

PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2022



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **22** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- b. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Tahun 2022 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
2022

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2022

BAB VI PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

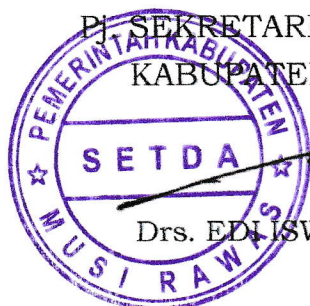
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal **12 Agustus** 2022
BUPATI MUSI RAWAS,



Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal **12 Agustus** 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. EDI ISWANTO, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR **22**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022, disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Sesuai fungsinya dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD-P Kabupaten Musi Rawas tahun 2022. Untuk selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program dan kegiatan hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD kabupaten Musi Rawas tahun 2022.

Muara Beliti , 12 Agustus 2022
BUPATI MUSI RAWAS



Ratna Machmud
RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
DAFTAR TABEL	iv-viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.6
1.3.1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan.....	I.6
1.4. Maksud Dan Tujuan	I.9
1.4.1 Maksud	I.9
1.4.2 Tujuan.....	I.9
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I.10
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022	II.1
2.1. Pengantar	II.1
2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD.....	II.1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah	III.1
3.2. Gambaran Perekonomian Daerah	III.6
3.3. Kerangka Keuangan Daerah.....	III.7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022	IV.1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2022....	IV.3
4.3. Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV.9
4.3.1 Telaah Terhadap RKP 2022.....	IV.9
4.3.2 Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	IV.11

4.3.3	Telaah Terhadap Pemenuhan Janji Kepala Daerah Pada Saat Kampanye Yang Tertuang Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.11
4.3.4	Telaah Terhadap Isu Strategis	IV.14
4.4.	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV.15
4.4.1	Prioritas, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV.15
4.5.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.	IV.87
4.6.	Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan	IV.99
4.6.1	Strategi Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19.....	IV.99
4.6.2	Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs.....	IV.102
4.6.3	Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).....	IV.108
4.6.4	Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM.....	IV.110
4.6.5	Arah Pengembangan Kecamatan	IV.111
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V.1
BAB VI	PENUTUP	VI.1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan....	II.2
Tabel 2.2	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	II.7
Tabel 2.3	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RS. Dr. Sobirin	II.13
Tabel 2.4	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga	II.14
Tabel 2.5	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan.....	II.22
Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.35
Tabel 2.7	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Sat. Pol PP	II.38
Tabel 2.8	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial	II.40
Tabel 2.9	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II.44
Tabel 2.10	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.47
Tabel 2.11	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	II.49
Tabel 2.12	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup .	II.52
Tabel 2.13	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II.55
Tabel 2.14	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II.57
Tabel 2.15	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II.60
Tabel 2.16	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	II.63
Tabel 2.17	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM	II.65
Tabel 2.18	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.69
Tabel 2.19	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga.....	II.71
Tabel 2.20	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II.74
Tabel 2.21	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II.76
Tabel 2.22	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip.....	II.78

Tabel 2.23	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan	II.81
Tabel 2.24	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan	II.84
Tabel 2.25	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan .	II.88
Tabel 2.26	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II.90
Tabel 2.27	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura	II.94
Tabel 2.28	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Mura	II.95
Tabel 2.29	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Protokol Setda Kab. Mura	II.95
Tabel 2.30	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Setda kab. Mura.....	II.96
Tabel 2.31	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kab. Mura.....	II.96
Tabel 2.32	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kab. Mura	II.97
Tabel 2.33	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Hukum Setda Kab. Mura	II.98
Tabel 2.34	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mura.....	II.98
Tabel 2.35	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Mura.....	II.99
Tabel 2.36	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Umum Setda Kab. Mura	II.99
Tabel 2.37	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD ...	II.101
Tabel 2.38	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.102
Tabel 2.39	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan	II.106
Tabel 2.40	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	II.109
Tabel 2.41	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	II.112
Tabel 2.42	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat.....	II.114
Tabel 2.43	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	II.117
Tabel 2.44	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II.120
Tabel 2.45	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Daerag	II.123

Tabel 2.46	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas.....	II.125
Tabel 2.47	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Selangit	II. 127
Tabel 2.48	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sumber Harta.....	II.129
Tabel 2.49	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tugumulyo	II.131
Tabel 2.50	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Purwodadi.....	II.134
Tabel 2.51	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Beliti	II.136
Tabel 2.52	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	II. 138
Tabel 2.53	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Jayaloka	II.140
Tabel 2.54	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sukakarya.....	II. 142
Tabel 2.55	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Kelingi.....	II.144
Tabel 2.56	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tuah Negeri.....	II.146
Tabel 2.57	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Lakitan.....	II.148
Tabel 2.58	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Mengang Sakti	II.150
Tabel 2.59	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan BTS Ulu	II.152
Tabel 3.1	Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	III.6
Tabel 3.2	Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022	III.8
Tabel 3.3	Struktur Perubahan Belanja Daerah.....	III.11
Tabel 3.4	Struktur Pembiayaan Daerah	III.12
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.1
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.2
Tabel 4.3	Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.7
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2022 dan Tema Pembangunan RKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2022	IV.8
Tabel 4.5	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.14
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.15

Tabel 4.7	Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.18
Tabel 4.8	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.42
Tabel 4.9	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.42
Tabel 4.10	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.43
Tabel 4.11	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.43
Tabel 4.12	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.44
Tabel 4.13	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.45
Tabel 4.14	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.45
Tabel 4.15	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.46
Tabel 4.16	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.46
Tabel 4.17	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.46
Tabel 4.18	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.47
Tabel 4.19	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.48
Tabel 4.20	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.48
Tabel 4.21	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.49
Tabel 4.22	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.49
Tabel 4.23	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.50
Tabel 4.24	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.50
Tabel 4.25	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.51
Tabel 4.26	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.51

Tabel 4.27	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.52
Tabel 4.28	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.52
Tabel 4.29	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.53
Tabel 4.30	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.53
Tabel 4.31	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.54
Tabel 4.32	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.54
Tabel 4.33	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.55
Tabel 4.34	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2022	IV.55
Tabel 4.35	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional	IV.56
Tabel 4.36	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Provinsi Tahun 2022.....	IV.87
Tabel 4.37	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 Dengan RPJMD Tahun 2021-2026	IV.90
Tabel 4.38	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Dalam Merespon Program SDGs.....	IV.105
Tabel 4.39	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarusutamaan Gender	IV.109
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	V.2
Tabel 5.2	Rencana Alokasi Pendanaan Untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2022.....	V.5
Tabel 5.3	Rencana Program dan Kegiatan Dengan Pembiayaan yang Bersumber Dari Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2022.....	V.27

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017- 2021..... III.1
Grafik 3.2	Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022..... III.2
Grafik 3.3	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021 dan Target Tahun 2022..... III.4
Grafik 3.4	Perubahan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022..... III.4
Grafik 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2021..... III.5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD	I.7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan jangka waktu perencanaan tertentu, dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2020 telah terjadi bencana non alam akibat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di seluruh dunia termasuk melanda seluruh wilayah Indonesia. Pandemi Covid-19 ini melumpuhkan sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui beberapa kebijakan baik yang bersifat pencegahan, penanganan kesehatan, dan penjaminan pengaman sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2022) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2022 Kabupaten Musi

Rawas. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2022, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah; serta
5. Percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional Tahun 2022 yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional Tahun 2021.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

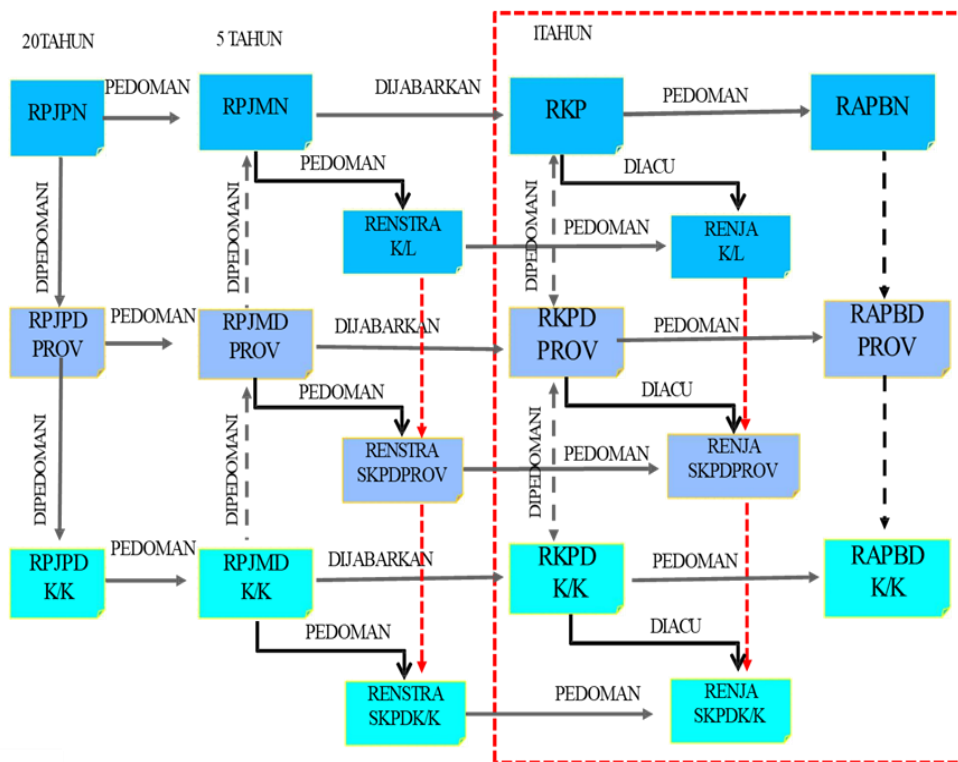
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sinkron dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas.

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Secara lengkap penjelasan masing-masing dokumen yang terkait dengan penyusunan Perubahan RKP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Perubahan RKP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pada dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam Perubahan RKP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 akan mendukung kebijakan pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi.

3. Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 mengacu pada dokumen Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan penjabaran Tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021.

5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Renstra OPD tersebut sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2022.

6. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Perubahan RKPD Tahun 2022 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen Perubahan Renja OPD Tahun 2022 sebagai rencana pembangunan tahunan di tingkat perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata perangkat daerah.

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas. Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2022.

Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai semester 1(satu), dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2022.

1.4.2. Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2022. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas tahun 2022
- c. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Musi Rawas.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 349, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2022

2.1. Pengantar

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi hasil RKPD tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Semester I Tahun 2022 dilakukan melalui analisa capaian Kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator kegiatan. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada bulan Juni program kegiatan tahun 2022 pada tiap OPD dengan capaian yang harus dicapai pada bulan Juni tahun 2022 dalam satuan persentase atau dengan notasi sebagai berikut: ***Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai bulan Juni 2022 / target bulan Juni 2022) x 100%***.

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari Kegiatan (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap OPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.2 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	315.053.219.140	112.929.498.967	35,84	14,12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.849.100	-	-	50,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.161.200	-	0,00	42,86
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.192.600	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.228.750	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.915.850	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.577.100	-	0,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.773.600	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	308.380.810.995	111.577.722.933	36,18	30,77
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	308.136.320.995	98.919.515.883	32,10	50,00
Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.861.000	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.629.000	-	0,00	27,78
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.000.000	-	0	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	175.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.585.000	-	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.240.000	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.345.000	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.916.445	-	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	453.087.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.499.445	-	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103.000.000	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.830.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.520.000	-		0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.520.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.558.746.000	1.351.776.034	15	60
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.959.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.379.787.000	657.180.000	15,00	63,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.791.600		0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.672.500	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.240.500	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.878.600	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.669.159.550	25.706.433.720	19	33
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	81.129.077.566	17.481.519.020	22	33
Penambahan Ruang Kelas Baru	683.540.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000	-	0,00	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	384.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.465.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	360.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.715.557.950	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	95.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	42.404.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	180.000.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	19.630.000.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	5.049.210.300	-	0,00	0,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	588.122.000	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	115.741.000	-	0,00	0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	376.648.600	-	0,00	25,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.058.000	-	0,00	0,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.129.741.500	-	0,00	0,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.065.387.600	17.481.519.020	42,57	50,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.999.950	-	0,00	0,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.088.666.666	-		0,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.053.152.534	8.224.914.700	18	33
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.090.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	486.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	550.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Laboratorium	5.160.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	690.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.753.900.384	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	630.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	49.180.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Unit Kesehatan Sekolah				
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	310.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	752.288.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	156.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.280.392.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel Sekolah	6.366.200.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	910.720.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.336.630.000	-		0,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	96.949.750	-	0,00	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.100.000		0,00	10,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.593.112.400	8.224.914.700	41,98	58,33
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	925.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	147.680.000	-	0,00	0,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.435.118.450	-	0	0
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	942.000.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	974.681.850	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	625.141.150	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD	336.000.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	91.200.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	0,00	0,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	127.198.600	-	0,00	0,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.690.950	-	0,00	0,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.088.205.900	-	0,00	0,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.051.811.000	-	0	0

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	0,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	993.146.400	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	58.664.600	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	113.388.500		0	0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000	-	0	0
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	-	0,00	0,00
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	-	0,00	0,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.388.500	-	0	0
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.388.500	-	0,00	0,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46.608.000	-	0	0
Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	46.608.000	-	0	0
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	46.608.000	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	14.987.000	-	0	0
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.987.000	-	0	0
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.987.000	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	14.613.000	-	0	0
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.613.000	-	0	0

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.613.000	-	0,00	0,00
JUMLAH	453.911.975.190	138.635.932.687	30,54	32,75

2. Dinas Kesehatan

Tabel 2.2
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	86.549.082.235	33.228.048.430	38,39	19,27
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.201.200	86.368.600	35,51	35,25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.357.100	13.365.350	30,13	30,13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.560.100	16.561.900	42,95	42,95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.560.100	21.857.300	56,68	56,68
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.906.350	13.146.100	47,11	47,11
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	28.392.850	8.112.600	28,57	28,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.647.100	5.529.000	15,96	15,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.777.600	7.796.350	25,33	25,33
Administrasi Perangkat Daerah	57.423.745.016	29.365.334.021	51,14	33,52
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.171.545.016	29.248.914.021	51,16	51,16
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.600.000	116.420.000	49,41	49,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.600.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.300.000	4.490.000	25,95	25,95
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.300.000	4.490.000	25,95	25,95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.000.000	61.836.869	17,67	15,90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	4.996.000	19,98	19,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	2.597.600	17,32	17,32
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	3.400.000	22,67	22,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000	50.843.269	19,56	19,56
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	15.000.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.096.052.000	2.184.421.233	30,78	30,72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	800.000	20,00	20,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.000.000	155.369.633	41,99	41,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.722.052.000	2.028.251.600	30,17	30,17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.040.000	48.788.300	13,78	25,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	29.514.800	29,51	29,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.780.000	16.273.500	15,53	15,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	3.000.000	30,00	30,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.260.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Pelayanan BLUD	21.004.744.019	1.476.809.407	7,03	7,03
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.004.744.019	1.476.809.407	7,03	7,03
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85.322.947.462	12.146.078.775		13,74
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	28.924.119.210	17.100.000	0,06	0,95
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.420.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	139.260.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.060.740.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.550.000.000		0,00	0,00
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	7.673.753.430		0,00	0,00
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	264.746.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.236.645.000		0,00	0,00
Pengadaan Obat, Vaksin	2.761.790.315	-	0,00	0,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.568.122.465	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85.000.000	-	0,00	0,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	164.062.000	17.100.000	10,42	10,42
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	56.148.828.252	12.092.991.175	21,54	18,39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.115.016.500	201.840.000	18,10	18,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.016.358.000	122.725.000	12,07	12,07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	322.842.000	47.016.900	14,56	14,56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	324.407.000	44.031.000	13,57	13,57

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	784.805.000	125.200.000	15,95	15,95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	164.275.000	9.900.000	6,03	6,03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	212.689.100	39.380.000	18,52	18,52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000	14.700.000	98,00	98,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	14.700.000	98,00	98,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	133.600.000	24.200.000	18,11	18,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	64.800.000	4.600.000	7,10	7,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	80.800.000	11.500.000	14,23	14,23
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.188.008.700	289.018.900	13,21	13,21
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	213.761.270	-	0,00	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.573.794.000	353.362.200	13,73	13,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	339.989.200	43.900.000	12,91	12,91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	653.713.600	86.557.700	13,24	13,24
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.079.499.800	164.354.100	15,23	15,23
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	35.000.000	-	0,00	0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	320.605.200	65.378.000	20,39	20,39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	136.750.000	26.900.000	19,67	19,67
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	203.357.820	40.177.700	19,76	19,76
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.276.161.600	859.265.000	16,29	16,29

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.438.127.262	8.985.162.479	26,09	26,09
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	6.500.000	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000	2.000.000	5,00	5,00
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40.000.000	-	0,00	0,00
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	430.000.000	26.845.000	6,24	6,24
Operasional Pelayanan Puskesmas	3.354.667.200	437.310.000	13,04	13,04
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	350.000.000	2.667.196	0,76	0,76
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	162.000.000	42.200.000	26,05	26,05
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	57.300.000	8.100.000	14,14	14,14
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	150.000.000	16.940.500	11,29	11,29
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	150.000.000	16.940.500	11,29	11,29
Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	19.047.100	19,05	19,05
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000	19.047.100	19,05	19,05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.942.000.000	133.291.000		5,60
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota	1.791.000.000	133.291.000	7,44	11,19
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000	5.250.000	26,25	26,25
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.746.000.000	128.041.000	7,33	7,33
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.000.000	-	0,00	0,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.000.000	-	0,00	0,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	302.224.620	45.656.800		27,85
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	175.856.620	22.352.600	12,71	37,25
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30.000.000	22.352.600	74,51	74,51
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	145.856.620	-	0,00	0,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	126.368.000	23.304.200	18,44	18,44
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	126.368.000	23.304.200	18,44	18,44
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidan Kesehatan	911.334.000	147.952.250		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	226.673.000	6.419.000	2,83	2,83
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	226.673.000	6.419.000	2,83	2,83

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Kesehatan dan Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	37.300.000	3.733.250	10,01	10,01
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	37.300.000	3.733.250	10,01	10,01
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	647.361.000	137.800.000	21,29	21,29
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	647.361.000	137.800.000	21,29	21,29
JUMLAH	175.027.588.317	45.701.027.255	26,11	13,29

3. Rs. Dr. Sobirin

Tabel 2.3

Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan RS. Dr. Sobirin

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.556.550	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.395.788.971	13.961.207.786	52,89	52,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.274.708.971	13.942.007.786	53,06	53,06
Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	121.080.000	19.200.000	15,86	15,86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.046.550.192	1.529.415.142	25,29	25,29

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1.826.150.192	783.915.142	42,93	42,93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.220.400.000	745.500.000	17,66	17,66
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.258.920.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota				
Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.258.920.000	-	0,00	0,00
JUMLAH	36.765.815.713	15.490.622.928	42,13	42,13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.250.000.000	30.498.274.067		
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	52.250.000.000			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	30.498.274.067	58,37	58,37
JUMLAH	89.015.815.713	45.988.896.995	51,66	51,66

4. Dinas PU Bina Marga

Tabel 2.4
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.185.982.546	2.461.151.326	24,16	21,75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000.000	46.250.000	16,52	14,87
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	12.900.000	25,80	0,26
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.000.000	17.250.000	38,33	0,38
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.000.000	0	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.000.000	16.100.000	35,78	0,36
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	45.000.000	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.181.919.346	1.969.710.643	47,10	42,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.006.729.346	1.937.150.643	48,35	22,72
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.190.000	32.560.000	18,59	2,23
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.040.200	0	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.040.200	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	598.737.500	137.755.498	23,01	20,71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.500.000	6.440.000	31,41	15,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.400.000	3.600.000	7,44	0,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119.837.500	37.239.770	31,08	10,88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	6.800.000	19,43	0,19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	83.675.728	22,31	8,93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.641.832.500	0	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	0	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	50.580.000	0	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.818.724.500	0	0,00	0,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	272.528.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.320.000	249.764.149	31,29	28,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	24.635.219	24,64	0,74
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	4.648.930	15,50	0,77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	668.320.000	220.480.000	32,99	8,25

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.133.000	57.671.036	9,53	8,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	22.009.336	22,01	1,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.580.000	6.003.200	5,80	0,35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	175.180.000	24.358.500	13,90	0,14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	5.300.000	16,56	0,50
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.373.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Jalan	195.915.474.973	3.298.148.075	1,68	1,36
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	195.915.474.973	3.298.148.075	1,68	1,36
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	811.500.000	100.167.500	12,34	0,12
Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Kabupaten	348.000.000	0	0,00	0,00
Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Kabupaten	93.000.000	0	0,00	0,00
Perencanaan Jalan dan Jembatan	370.500.000	100.167.500	27,04	0,27
Pengelolaan Leger Jalan	256.000.000	0	0,00	0,00
Pengadaan Patok Leger Jalan dan Papan Nama Jembatan	50.000.000	0	0,00	0,00
Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan Berbasis Barcode	93.000.000	0	0,00	0,00
Penyusunan aplikasi sistem informasi jalan (Website)	93.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Pengelolaan Leger Jalan	20.000.000	0	0,00	0,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	129.000.000	0	0,00	0,09

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Survei kondisi jalan	57.000.000	0	0,00	10,66
Survei kondisi jembatan	57.000.000	0	0,00	10,66
Administrasi Pekerjaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	15.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Jalan	1.365.000.000	0	0,00	#REF!
Pembangunan Jalan Akses Jembatan Multifungsi Sungai Musi Desa Sungai Bunut (TMMD)	1.000.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Jalan Desa Beliti Jaya	345.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Pembangunan Jalan	20.000.000	0	0,00	0,00
Pelebaran Jalan Menuju Standar	14.738.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Ciptodadi - Rantau Alih - Ngestiboga I (K.063/K.081)	4.500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Desa Ciptodadi - Desa Sugih Waras (K.004)	6.500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan B.Srikaton - C. Nawangsasi - M.Siitiharjo (K.012)	2.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan G1 Mataram - L Sidoharjo (K.016)	1.500.000.000	0	0,00	0,00
Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar	203.000.000	0	0,00	5,33
Administrasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan	35.000.000	0	0,00	0,00
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	38.620.799.000	0	0,00	0,02
Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Spg Jayaloka - Marga Tani (DAK Reguler)	10.186.892.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan SP.4 Kelingi IV.a - Ma. Lakitan (DAK Reguler)	6.797.486.000	0	0,00	0,80
Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Spg Pelawe - Pelawe (DAK Reguler)	8.850.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Surodadi - Tegal Rejo (DAK Penugasan)	6.000.000.000	0	0,00	1,18
Peningkatan Jalan Sukakarya - Spg Marga Tani (DAK Penugasan)	6.236.421.000	0	0,00	0,10
Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan DAK Reguler	203.000.000	0	0,00	6,00
Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan DAK Penugasan	203.000.000	0	0,00	9,33

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	144.000.000	0	0,00	0,00
Rekonstruksi Jalan	108.549.000.000	97.750.000	0,09	0,04
Peningkatan Jalan Lubuk Tua - Desa Mulyosari (K.051)	3.700.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Pasar Megang Sakti - Desa Mulyosari (K.045)	6.100.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan O.Mangun Harjo - Megang Sakti - Muara Megang (K.013)	9.800.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Dangku - Pagar Ayu - Lubuk Tua (K.079)	2.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Spg SMP Lubuk Tua - Dusun Lubuk Sari (K.091)	2.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Dusun Lubuk Sari - Desa Beliti Jaya (K.091)	2.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Megang Sakti I - Kebun Kulim - Jajaran Baru I (K.087)	5.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan SP.7 Kota Baru - SP.4 Mulyoharjo (K.107)	2.400.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Sp. Sungai Naik - Sungai Naik - SP.4 Mulyoharjo (K.100/K.108)	2.400.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Purwodadi - Sadar Karya - Tri Karya (K.054)	2.500.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Sukowono - Margatani (K.038)	2.400.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa SP.7 Kota Baru	500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Sumber Harta - U1. Pagar Sari - Sumber Sari (K.060)	5.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Sukakarya (Ciptodadi - Binjai (K.027), Desa Ciptodadi II)	5.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Lubuk Tua - Tugu Sempurna (Eks TMMD) (K.115)	5.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Mandi Aur - Kerambil (K.103)	2.500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Jajaran Baru I - SP.4 Campur Sari (K.088)	5.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Sugih Waras - Desa Suro (K.096)	1.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan S. Kertosari - U.1 Pagar Sari (K.025)	1.500.000.000	0	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Jalan F. Trikoyo - V. Surodadi (K.014)	500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa U.2 Karya Dadi	1.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Bamasco - Dangku (K.048)	500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan L. Sidoharjo - V. Surodadi (K.012)	500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan SP. 9 Bangun Jaya - SP. 3 Tri Mukti- Batas Lahat (K.105)	2.500.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Muara Beliti - Durian Remuk - Muara Kati Lama (K.009/K.010)	2.500.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Simpang Gegas - Sugih Waras (K.076)	1.000.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Muara Kelingi - Sp. Temuan Jaya (K.131)	1.500.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Purwodadi - Trikarya - Megang Sakti II (K.032)	2.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan dalam kecamatan tuah negeri (Dharma Sakti - Banpres, Desa Lubuk Rumbai Dusun Kerambil)	1.185.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan dalam Kecamatan Muara Beliti (Komplek Perkantoran,Perumahan)	1.000.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Semangus Baru	490.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Prabumulih I	390.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Pelita Jaya	2.985.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Sidomulyo	985.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Marga Baru	1.485.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Semeteh	985.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Semangus Baru (SAD)	390.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Sungai Pinang (Dusun I)	295.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Muara Rengas	490.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Pendingan	295.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Kelurahan B.Srikaton	200.000.000	0	0,00	92,00
Peningkatan Jalan Desa G.1 Mataram	640.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa L.	790.000.000	0	0,00	0,10

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Sidoarjo (Dusun I)				
Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Tugumulyo	200.000.000	0	0,00	92,00
Peningkatan Jalan Desa SP.8 Trijaya	390.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Kelurahan SP.9 Bangun Jaya	200.000.000	97.750.000	48,88	70,00
Peningkatan Jalan Desa T.2 Purwakarya	390.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa R. Rejosari	295.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Air Lesing	390.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa STD	440.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Sukarejo	245.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Babat	890.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Kelurahan Sumber Harta	490.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Madang	985.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Tua	390.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Karya Teladan	490.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Karya Mukti	490.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Tanjung	490.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Petrans Jaya	295.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Muda	345.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Beliti Jaya	985.000.000	0	0,00	0,30
Peningkatan Jalan Desa Pulau Panggung	590.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Temuan Sari	490.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Bangun Rejo	490.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Rantau Alih - Marga Tani (K.089)	985.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Ngestiboga II - Tambangan (K.085)	1.985.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Giriyo	985.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Kertosono	200.000.000	0	0,00	0,30
Peningkatan Jalan Desa Donorejo	400.000.000	0	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Dharma Sakti	985.000.000	0	0,00	0,10
Peningkatan Jalan Desa Muara Megang (Lubuk Gulah)	300.000.000	0	0,00	0,10

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Jalan Desa Mana Resmi	400.000.000	0	0,00	0,00
Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan	337.000.000	0	0,00	5,33
Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan 2	203.000.000	0	0,00	5,33
Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan 3	203.000.000	0	0,00	5,33
Administrasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan	206.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan	1.380.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona I	450.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona II	450.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten - Zona III	450.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	450.000.000	113.130.575	25,14	0,25
Operasioanal UPT	450.000.000	113.130.575	25,14	0,25
Pembangunan Jembatan	11.434.175.973	0	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Gantung Multifungsi Sungai Musi Desa Pelawe (Tahap V)	9.392.175.973	0	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Margoyoso	200.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pulau Panggung	250.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa Muara Megang	400.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa Sungai Naik - Pangkalan Tarum	400.000.000	0	0,00	0,10
Pembangunan Jembatan Besi Desa Semangus Lama	400.000.000	0	0,00	0,00
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jembatan	337.000.000	0	0,00	6,00
Administrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan	55.000.000	0	0,00	0,00
Penggantian Jembatan	17.572.000.000	2.987.100.000	17,00	0,00
Penggantian Box Culvert Desa SP.7 Kota Baru (K.043)	1.200.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Air Temuan Desa Temuan Jaya (K. 092)	6.000.000.000	0	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Sungai Malus Desa Sukarami	10.000.000.000	2.987.100.000	29,87	0,30
Jasa Konsultansi Pengawasan	337.000.000	0	0,00	6,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penggantian Jembatan				
Administrasi Pekerjaan Penggantian Jembatan	35.000.000	0	0,00	0,00
Rehabilitasi Jembatan	510.000.000	0	0,00	0,00
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Muara Beliti Baru	500.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan	10.000.000	0	0,00	0,00
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	100.000.000	0	0,00	0,00
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	100.000.000	0	0,00	0,00
JUMLAH	206.101.457.519	5.759.299.401	2,79	0,02

5. Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Tabel 2.5
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.126.884.737			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	474.685.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.685.000	33.790.850,00	14,91%	
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	64.000.000			50,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Keciptakarya	162.685.000			37,50%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.000.000	5.494.800,00	20,35%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.000.000	8.928.500,00	33,07%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	7.579.450,00	10,11%	50,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	-	0,00%	50,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.053.772.001			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.791.772.001	5.730.082.641,00	53,10%	57,14%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.000.000	93.389.100,00	39,74%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.000.000	7.909.100,00	29,29%	50,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.000.000			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.000.000	8.203.300,00	37,29%	25,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.000.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	-	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	810.000,00	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000	585.000,00	0,90%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.599.280.000			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	5.000.000,00	33,33%	42,86%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.280.000	11.117.800,00	12,59%	25,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	12.378.400,00	49,51%	53,85%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	22.140.400,00	22,14%	33,33%
Penyediaan Bahan/Material	1.037.500.000	-	0,00%	
Pengadaan Material Jaringan Listrik dan Lampu Jalan di Kabupaten Musi Rawas	537.500.000			0,00%
Pengadaan Tawas dan Bahan Kimia	500.000.000			0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.500.000	145.078.859,00	43,50%	50,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.653.500.000			
Pengadaan Mebel	253.500.000	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.400.000.000	-	0,00%	
Lanjutan Pembangunan Kantor Koramil Kecamatan Selangit	300.000.000			0,00%
Lanjutan Pembangunan Polsubsektor Selangit	400.000.000			0,00%
Pembangunan Gedung Kejaksaan	2.500.000.000			10,00%
Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor ATR/ BPN Kabupaten Musi Rawas	900.000.000			0,00%
Penyusunan Master Plan dan DED Pengembangan Rumah Sakit Muara Beliti	500.000.000			0,00%
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kejaksaan	150.000.000			10,00%
Pembangunan Pagar Kantor Camat Tiang Pumpung Kepungut	400.000.000			10,00%
Pembangunan Pagar SD 1 Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	250.000.000			10,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.611.601.048			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	16.320.000,00	65,28%	66,67%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.006.023.647	2.272.943.590,00	45,40%	50,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.909.273	3.560.000,00	4,46%	7,22%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.668.128	740.509.800,00	49,35%	50,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.375.000.000			

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	33.059.238,00	33,06%	50,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	23.288.800,00	31,05%	25,00%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	550.000.000	121.450.000,00	22,08%	
Pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Dinas Bupati Musi Rawas	150.000.000			60,00%
Pemeliharaan Jaringan Listrik di Kantor Dinas PUCKTRP	100.000.000			60,00%
Pemeliharaan Rutin Jaringan Listrik dan LPJU di Kabupaten Musi Rawas	300.000.000			0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.650.000.000	-	0,00%	
Rehabilitasi Kantor UPT Pengairan Kecamatan Tugumulyo	150.000.000			0,00%
Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Musi Rawas	500.000.000			0,00%
Lanjutan Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Musi Rawas	500.000.000			0,00%
Rehab Rumah Dinas Jabatan Kapolres, Ruang Kerja Kapolres dan Lobby Silampari Polres Musi Rawas	500.000.000			0,00%
Peningkatan Pelayanan BLUD	5.122.046.688			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.122.046.688	2.130.916.753,00	41,60%	50,00%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.998.231.000			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.380.000.000			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	250.000.000	-	0,00%	
Detail Desain Bangunan Pengendali Banjir Sungai Megang di Bendung Megang Tikip	250.000.000			0,00%
Peningkatan Tanggul Sungai	500.000.000	-	0,00%	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembangunan Bronjong Belakang Polsek Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan	500.000.000			0,00%
Normalisasi/Restorasi Sungai	1.430.000.000	-	0,00%	
Normalisasi Anak Sungai Lesing Besar	349.625.550			0,00%
Normalisasi Sungai Benai	229.999.750			10,00%
Normalisasi Sungai Senaro	250.374.700			0,00%
Normalisasi Sungai Desa G2 Dwijaya	199.954.400			10,00%
Normalisasi Sungai Desa Tegalrejo	200.090.000			10,00%
Normalisasi Sungai Desa Trikarya	199.955.600			0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	13.113.144,00	6,56%	
Komisi Irigasi (Komir)	200.000.000			50,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.618.231.000			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	-	0,00%	
SID Daerah Irigasi Baru di Kecamatan Muara Kelingi	299.999.750			0,00%
Studi Kelayakan Daerah Irigasi Baru Lesing Kecil di Kecamatan Megang Sakti	100.000.250			0,00%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.250.000.000	-	0,00%	
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Q2 Wonorejo	299.999.800			0,00%
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier di Kelurahan Srikaton Kec.Tugumulyo	250.000.200			0,00%
Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa U1 Pagar Sari Kecamatan Purwodadi	199.954.000			10,00%
Peningkatan Jaringan Irigasi Desa O Mangun Harjo Kecamatan Purwodadi	500.046.000			0,00%
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Megang Tikip	350.000.000			0,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sukaraya	650.000.000			0,00%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.118.231.000	-	0,00%	
Dana Alokasi Khusus (DAK) :				
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jajaran Baru	1.000.000.000			0,00%
- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sukamana	1.036.500.000			0,00%
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Deras II	850.000.000			0,00%
- Survey dan Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Irigasi (E-paksi)-Kegiatan Penunjang	50.000.000			10,00%
- Supervisi Kegiatan DAK Bidang Irigasi-Kegiatan Penunjang	58.000.000			10,00%
- Kegiatan Penunjang dll	43.731.000			50,00%
Biaya Penunjang / Operasional DAK dll (APBD)	80.000.000			25,00%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.650.000.000	772.592.000,00	46,82%	
Operasional Unit Pengelola Irigasi	200.000.000	24.629.432,00	12,31%	
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Lakitan	100.000.000			50,00%
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelingi Tugumulyo	100.000.000			50,00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.627.806.000			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.627.806.000			
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.051.400.000	-	0,00%	
Dana Alokasi Khusus (DAK) :				
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering - Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri (Dana Alokasi Khusus/DAK)	410.000.000			10,00%
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering - Desa Ciptodadi II Kecamatan	375.000.000			10,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Sukakarya (Dana Alokasi Khusus/DAK)				
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering - Desa Kota Baru Kecamatan BTS Ulu (Dana Alokasi Khusus/DAK)	440.000.000			10,00%
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering - Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti (Dana Alokasi Khusus/DAK)	450.000.000			10,00%
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering - Desa Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo (Dana Alokasi Khusus/DAK)	420.000.000			10,00%
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering - Desa Pagar Sari Kecamatan Purwodadi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	350.000.000			10,00%
- Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) /Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering - Desa Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo (Dana Alokasi Khusus/DAK)	425.000.000			10,00%
- Jasa Pendamping / Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola-Kegiatan Penunjang	127.400.000			14,29%
- Kegiatan Penunjang dll	54.000.000			25,00%
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.576.406.000	-	0,00%	
Dana Alokasi Khusus (DAK) :				
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK STL Ulu Terawas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	728.000.000			0,00%
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK BTS Ulu (Dana Alokasi Khusus/DAK)	728.000.000			0,00%
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK Muara Beliti (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.196.000.000			0,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK Muara Kelingi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	728.000.000			0,00%
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK Tugumulyo (Dana Alokasi Khusus/DAK)	994.500.000			0,00%
- Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual -Kegiatan Penunjang	100.000.000			0,00%
- Kegiatan Penunjang dll	67.956.000			25,00%
Biaya Penunjang / Operasional DAK dll (APBD)	80.000.000			0,00%
Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Terawas	350.000.000			0,00%
Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi	100.000.000			0,00%
Pengadaan Pompa Intake dan Distribusi SPAM IKK Muara Lakitan	700.000.000			0,00%
Pengadaan Pompa Intake dan Distribusi SPAM IKK Simpang Semambang	200.000.000			0,00%
Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi SPAM IKK Karya Sakti	1.000.000.000			0,00%
SPH Pembangunan Sumur Bor dalam (Deep Well) dan Jaringan Perpipaan Desa Ngestikarya Kecamatan Jayaloka	53.950.000			0,00%
Pengadaan Stabilizer 250 KVA, 3 Phase SPAM IKK Muara Beliti	550.000.000			0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.269.257.000			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.269.257.000			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	18.081.639,00	22,60%	
Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Musi Rawas	11.795.600			75,00%
Pembahasan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik	68.204.400			100,00%
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	80.000.000	18.480.900,00	23,10%	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Musi Rawas	80.000.000			50,00%
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	3.109.257.000	-	0,00%	
Dana Alokasi Khusus (DAK) :				
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri	364.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti	357.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka	357.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Kota Baru Kecamatan BTS Ulu	364.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi	364.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang sakti	357.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti	357.000.000			10,00%
- Pembangunan tangki septik skala individu di Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta	357.000.000			10,00%
- Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan DAK Fisik yang Dilakukan Secara Swakelola	145.600.000			14,29%
- Kegiatan Penunjang dll	6.657.000			25,00%
Biaya Penunjang / Operasional DAK dll (APBD)	80.000.000			0,00%
Program Pengembangan Permukiman	13.292.000.000			
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.292.000.000			
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.809.000.000	97.750.000,00	0,76%	
Pembangunan Drainase RT.07 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	150.000.000			10,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembangunan Talud Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000			10,00%
Pembangunan Talud Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri	149.999.950			10,00%
Pembangunan Talud Desa L. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			10,00%
Pembangunan Talud Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi	199.999.950			0,00%
Lanjutan Pembangunan Cor Beton Alun-alun Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan	500.000.100			0,00%
Lanjutan Pembangunan Gapura Perbatasan Kabupaten Musi Rawas-Musi Banyuasin di Kecamatan Muara Lakitan	450.000.000			0,00%
Pemasangan KWH Meter dan instalasi listrik pada Rumah Tangga miskin Di Kabupaten Musi Rawas	150.000.000			0,00%
Pembangunan Jalan ke Makam Desa D Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			0,00%
Pembangunan Masjid Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan	650.000.000			0,00%
Pembangunan Pagar Pura Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000			10,00%
Pembangunan Pagar TPU Desa Batu Bandung Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	250.000.000			0,00%
Pembangunan Pagar TPU Kelurahan Muara Beliti	400.000.000			0,00%
Pembangunan Taman Olahraga Desa Muara Kati Kecamatan TPK	2.794.000.000			0,00%
Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Taman Olahraga Desa Muara Kati Kecamatan TPK	93.000.000			70,00%
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Taman Olahraga Desa Muara Kati Kecamatan TPK	113.000.000			0,00%
Pengadaan dan Pemasangan Genset Perkantoran Pemkab Musi Rawas	700.000.000			0,00%
Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Prasarana Pertamanan dan Kelistrikan	97.000.000			0,00%
Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	457.000.000			0,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	93.000.000			0,00%
Pembangunan Talud TPU Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti	250.000.000			0,00%
Pembangunan Drainase Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti	800.000.000			0,00%
Pembuatan Median Jalan Muara Beliti-Lubuklinggau	2.887.000.000			0,00%
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Median Jalan Muara Beliti-Lubuklinggau	113.000.000			0,00%
Rasionalisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU)	200.000.000			0,00%
Pembayaran Kewajiban PNPB pada Areal Kerjasama Jaringan Listrik Desa Harapan Makmur	12.000.000			0,00%
Pembayaran Pemindahan Jaringan Listrik di Jalan Muara Beliti - Lubuklinggau	500.000.000			0,00%
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	483.000.000	209.927.750,00	43,46%	
Pemeliharaan Rutin Kebersihan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Sekitarnya	200.000.000			50,00%
Pemeliharaan Rutin Taman	200.004.450			50,00%
Pembuatan Taman	82.995.550			0,00%
Program Penataan Bangunan Gedung	62.301.500.000			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	62.301.500.000			
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	325.000.000	24.248.861,00	7,46%	
Pendataan dan Perhitungan HSBGN	125.000.000			33,33%
Penyusunan Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	200.000.000			33,33%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	58.961.500.000	-	0,00%	
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri	350.000.000			0,00%
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Tegal Sari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000			10,00%
Pembangunan Balai Kampung Dusun 5 Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000			0,00%
Pembangunan Gedung Nahdhatul Ulama Kabupaten Musi Rawas (Tahap II)	461.500.000			0,00%
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Margoyoso	400.000.000			0,00%
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Pendingan Kecamatan Muara Lakitan	400.000.000			0,00%
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan	400.000.000			0,00%
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sukowono Kecamatan Jayaloka	750.000.000			0,00%
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu	750.000.000			0,00%
Konsultan Supervisi Pembangunan RSUD Musi Rawas	600.000.000			0,00%
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pengembangan Pembangunan RSUD Musi Rawas	800.000.000			0,00%
Penyusunan Feasibility Study (FS) dan DED Pembangunan Gedung Bandiklat di Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas	300.000.000			0,00%
Penyusunan Dokumen ANDALALIN RSUD Musi Rawas	250.000.000			0,00%
Lanjutan Pembangunan RSUD Musi Rawas	50.499.999.999			0,00%
Supervisi Penyelesaian Pembangunan Stadion Musi Rawas (Stadion Gelora Herman Deru)	100.000.000			0,00%
Penyelesaian Pembangunan Stadion Musi Rawas (Stadion Gelora Herman Deru)	2.000.000.000			0,00%
Pembangunan Pos Polisi Bundaran Muara Beliti	500.000.000			0,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.015.000.000	-	0,00%	
Rehabilitasi Rumah Imam/ Marbot Masjid Darussalam Muara Beliti	120.000.000			0,00%
Rehabilitasi Balai Desa Bumi Rejo Kecamatan Jayaloka	100.000.000			0,00%
Rehabilitasi Balai Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo	300.000.000			0,00%
Rehabilitasi Balai Desa V Surodadi Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Darma Sakti Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000			0,00%
Rehabilitasi Balai Desa Desa Sugih Waras Kecamatan Sukakarya	195.000.000			0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka	200.000.000			10,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan	500.000.000			0,00%
Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti	1.200.000.000			0,00%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.300.000.000			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	750.000.000			
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	750.000.000	41.348.288,00	5,51%	
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	150.000.000			50,00%
Penyusunan KLHS Revisi RTRW Tahun 2011-2031	400.000.000			0,00%
Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Musi Rawas	200.000.000			50,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000	23.815.400,00	15,88%	
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	150.000.000			50,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000			

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	300.000.000	1.820.000,00	0,61%	
Monitoring dan Evaluasi Menara (Tower Telekomunikasi)	300.000.000			50,00%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000	2.405.000,00	2,40%	
Penyusunan pendataan dokumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada deliniasi daerah tertentu	100.000.000			50,00%
J U M L A H	133.915.678.737	12.682.748.795,00	9,47%	14,27%

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.6
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Belanja Langsung	73.246.817.551	6.084.301.719	8,31	12,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.015.243.142	1.820.210.617	45,33	45,33
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	-	0,00	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	-	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.103.422	1.439.921.789	57,32	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.103.422	1.381.571.789	59,62	42,86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.000.000	58.350.000	31,54	41,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	-	0,00	66,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.518.000	-	0,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.518.000	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.618.000	142.292.660	37,29	37,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.000.000	16.180.000	43,73	66,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	8.836.360	44,18	75,00
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	40.000.000	8.043.000	20,11	66,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	40.000.000	11.930.000	29,83	33,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.618.000	66.303.300	31,04	500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.638.720	197.153.968	38,91	38,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	5.000.000	16,67	500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.998.720	23.333.968	38,89	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.640.000	168.820.000	40,52	41,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.365.000	40.842.200	15,93	15,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	35.842.200	35,84	28,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	5.000.000	12,50	40,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.365.000	-	0,00	0,00
Program Pengembangan Perumahan	784.066.600	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	784.066.600	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	784.066.600	-	0,00	0,00
Program Kawasan Permukiman	9.136.575.500	29.515.754	0,32	0,32
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	650.000.000	18.808.200	2,89	2,89
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	549.999.900	12.253.600	2,23	0,00
Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	100.000.100	6.554.600	6,55	0,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.486.575.500	10.707.554	0,13	0,13
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	282.281.500	10.707.554	3,79	0,00
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8.204.294.000	28.600.000	0,35	0,35
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	35.310.932.309	86.866.800	0,25	0,25
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35.310.932.309	86.866.800	0,25	0,25
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	150.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35.160.932.309	86.866.800	0,25	0,25
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	401.646.000	40.069.600	9,98	9,98
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.646.000	40.069.600	9,98	9,98
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	401.646.000	40.069.600	9,98	9,98
Program Penatagunaan Tanah	23.598.354.000	4.107.638.948	17,41	17,41
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	23.598.354.000	4.107.638.948	17,41	17,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	23.598.354.000	4.107.638.948	17,41	1,33

7. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.066.500	11.342.500	56,52	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.189.500	11.890.500	58,89	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.064.200	-	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.507.100	13.983.100	68,19	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20.140.000	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.983.700		0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.718.751.023	3.212.346.147	56,17	56,17
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.504.400	33.275.550	42,93	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12.499.900	5.430.700	43,45	52,63
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.995.600	4.991.400	49,94	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.175.000	-	0,00	33,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.000.000	3.800.000	14,62	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000	17.640.000	46,42	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.961.300	130.720.601	51,27	51,27

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.450.000	-	0,00	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.462.000	10.155.255	26,40	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.018.590.000	1.163.950.000	57,66	75,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.800.000	1.020.425	3,67	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.214.900	147.381.500	49,75	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	10.000.000	45,45	50,00
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Atau Kota				
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan Cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	897.677.550	452.147.050	50,37	50,37
Penindakan atas gangguan Ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	188.982.150	54.596.650	28,89	55,56
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	33.850.000	56,42	64,58
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.000.000	31.908.600	42,54	50,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	600.000.000	498.500.000	83,08	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota				
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	150.000.000	35.388.600	23,59	50,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Keuangan				
Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten atau Kota	124.999.700	36.012.700	28,81	50,00
JUMLAH	10.775.014.523	5.920.331.278	54,94	55,14

8. Dinas Sosial

Tabel 2.8
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Sosial

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	9.735.400.266	4.680.630.261	48,08	49,13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.619.598.266	1.895.787.411	52,38	52,26
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.198.700	56.372.800	38,04	56,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.422.000	17.224.500	44,83	55,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.046.600	5.644.450	40,18	55,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.738.600	3.538.250	24,01	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.946.600	4.939.200	33,05	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.738.600	1.200.000	8,14	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.934.200	13.568.400	80,12	85,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.372.100	10.258.000	29,84	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.488.818.444	1.501.684.508	60,34	65,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.379.070.644	1.449.221.958	60,92	75,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.115.600	46.501.450	48,38	65,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.632.200	5.961.100	43,73	55,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.926.800	5.079.000	56,90	65,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.926.800	5.079.000	56,90	65,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.256.000	88.573.900	231,53	36,88
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.256.000	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.912.600	83.503.900	34,66	47,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.070.000	5.070.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.196.600	24.213.400	34,99	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.646.000	54.220.500	37,75	40,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.750.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	16.750.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.757.722	187.861.203	62,33	70,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.925.194	19.070.903	42,45	55,00
Penyediaan Jasa Pelayanan	373.332.528	166.290.300	44,54	55,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Umum Kantor				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.978.000	61.286.000	23,85	25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.860.000	19.753.250	29,11	40,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.618.000	41.532.750	23,78	35,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000	0	0,00	0,00
Program Pemberdayaan Sosial	773.654.900	93.118.600	12,04	37
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	99.389.500	23.449.500	23,59	35
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	65.789.500	22.249.500	33,82	45,00
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	33.600.000	1.200.000	3,57	25,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	674.265.400	69.669.100	10,33	38,33
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64.033.600	22.033.600	34,41	50,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.260.600	29.155.800	34,20	45,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	524.971.200	18.479.700	3,52	20,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	23.999.900	2.843.300	11,85	20,00
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.999.900	2.843.300	11,85	20,00
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.999.900	2.843.300	11,85	20,00
Program Rehabilitasi Sosial	818.290.400	271.564.800	33,19	36,67

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	818.290.400	271.564.800	33,19	36,67
Penyediaan Permakanan	79.153.400	7.831.500	9,89	15,00
Penyediaan Sandang	38.449.500	7.158.900	18,62	25,00
Penyediaan Alat Bantu	133.678.700	18.966.300	14,19	30,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	53.757.200	5.158.400	9,60	50,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	59.400.000	13.820.800	23,27	50,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	453.851.600	218.628.900	48,17	50,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.128.194.700	2.340.457.750	56,69	44
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	60.124.800	10.781.800	17,93	40
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	60.124.800	10.781.800	17,93	40
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.068.069.900	2.329.675.950	57,27	48
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	285.801.000	106.169.750	37,15	55
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.675.161.900	2.216.921.700	60,32	75
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	107.107.000	6.584.500	6,15	15
Program Penanganan Bencana	371.662.100	76.858.400	20,68	50
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	166.163.100	24.490.800	14,74	50
Penyediaan Makanan	102.900.500	14.655.500	14,24	50
Penyediaan Sandang	63.262.600	9.835.300	15,55	50
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	205.499.000	52.367.600	25,48	50
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	205.499.000	52.367.600	25,48	50
JUMLAH	9.735.400.266	4.680.630.261	48,08	49,13

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.9
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	5.916.450	39,44	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	5.896.950	39,31	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	5.770.050	38,47	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	5.930.400	39,54	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	5.941.500	39,61	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	5.940.100	39,60	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	9.318.100	31,06	6,90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.571.383.926	642.353.598	24,98	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.960.000	39.060.000	45,97	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	20.493.000	11.383.500	55,55	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.374.000	18.293.500	62,28	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	19.926.500	66,42	57,14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.500.000	35.400.000	83,29	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.605.000	8.458.500	17,40	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000	4.985.000	16,08	20,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	2.450.000	24,50	33,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.064.000	79.668.800	67,48	21,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.500.000	50,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.922.805	29.168.222	29,19	16,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.712.200	221.928.600	49,79	46,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.280.450	37.906.631	49,05	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.500.000	7.000.000	25,45	0,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	60.000.000	4.404.200	7,34	0,00
Program Penempatan Tenaga Kerja				
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	52.000.150	14.532.450	27,95	0,00
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	18.000.000	8.309.750	46,17	0,00
Program Hubungan Industrial				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	26.716.200		0,00	5,00
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	13.813.600	30,70	0,00
<i>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>				
<i>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</i>				
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	75.000.000	26.650.800	35,53	0,00
JUMLAH	4.046.511.731	1.272.907.201	31,46	71,98

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.10
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.585.870.861	923.565.314	58,24	58,24
Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.240.000	24.120.000	42,14	42,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.400.000	28,00	28,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000		-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	6.300.000	31,50	31,50
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	8.000.000	2.830.000	35,38	35,38
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	112.620.000	12.500.000	11,10	11,10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.018.000	24.102.100	21,52	21,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000	1.800.000	64,29	64,29
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.309.000	18.668.865	47,49	47,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.680.000	128.220.000	98,12	98,12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.560.000	13.855.000	42,55	42,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.498.150		-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	5.000.000	50,00	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Dukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	100.000.000	50,00	50,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.800.100	59.992.000	64,65	64,65
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.806.000		-	-
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	212.538.400	40.576.600	19,09	19,09
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)				
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.078.800	7.344.000	10,19	10,19

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Perlindungan Khusus Anak				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.950.000		-	-
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	262.044.000		-	-
JUMLAH	3.203.313.311	1.370.273.879	42,78	42,78

11. Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.11
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.303.940.740	1.821.376.254	55,13	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.287.350,00	42.554.500,00	38,59	53,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.287.350,00	16.070.300,00	39,89	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000,00	11.489.800,00	32,83	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000,00	14.994.400,00	42,84	60,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.363.893.450,00	1.374.219.903,00	58,13	51,10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.141.450,00	1.346.824.703,00	58,53	58,53

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.752.000,00	27.395.200,00	43,66	43,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.270.000,00	158.887.600,00	49,77	51,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.440.000,00	2.290.000,00	30,78	31,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.810.000,00	41.450.000,00	90,48	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.750.000,00	2.900.000,00	37,42	37,42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.000.000,00	19.843.000,00	47,25	48,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.270.000,00	92.404.600,00	42,73	43,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.497.940,00	193.658.751,00	48,72	48,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.125.000,00	2.660.000,00	51,90	52,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.183.500,00	17.139.551,00	42,65	43,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.189.440,00	173.859.200,00	49,37	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.992.000,00	52.055.500,00	46,07	45,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	97.992.000,00	45.635.500,00	46,57	47,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	6.420.000,00	42,80	43,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.017.312.000,00	0,00	-	14,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.017.312.000,00	0,00	-	14,00
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	4.900.000.000,00	0,00	-	20,00
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	117.312.000,00	0,00	-	8,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	235.450.000,00	28.793.750,00	12,23	26,50
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	114.867.000,00	10.423.350,00	9,07	15,00
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	114.867.000,00	10.423.350,00	9,07	15,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	26.592.000,00	11.656.500,00	43,83	51,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan kabupaten/Kota	26.592.000,00	11.656.500,00	43,83	51,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	93.991.000,00	6.713.900,00	7,14	13,50
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	31.641.000,00	3.948.700,00	12,48	15,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	62.350.000,00	2.765.200,00	4,43	12,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	109.880.000,00	18.790.400,00	17,10	17,65
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	68.792.000,00	11.693.200,00	17,00	18,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.088.000,00	7.097.200,00	17,27	17,30
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	41.088.000,00	7.097.200,00	17,27	17,30
Program Pengawasan Keamanan Pangan	101.374.800,00	14.630.200,00	14,43	21,67
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	101.374.800,00	14.630.200,00	14,43	21,67
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	47.672.800,00	12.362.200,00	25,93	35,00
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.191.800,00	0,00	-	10,00
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.510.200,00	2.268.000,00	5,34	20,00
JUMLAH	8.767.957.540	1.883.590.604	21,48	35,96

12. Dinas Lingkungag Hidup

Tabel 2.12
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Dinas Lingkungan Hidup	7.059.919.680	2.319.217.826		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	4.087.552.722	1.810.314.176	44,29	75,75
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	3.781.200	18,91	22,25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	1.012.700	20,25	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	998.700	19,97	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	932.800	18,66	20,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	837.000	16,74	19,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.748.825.874	1.083.179.947	39,41	38,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.668.265.874	1.050.755.947	39,38	40,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.560.000	30.930.000	43,84	49,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000	1.494.000	14,94	25,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.093.700	116.089.779	47,76	59,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.000	2.423.500	48,51	50,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.495.550	900.000	12,01	15,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	5.467.900	54,68	60,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.602.150	107.298.379	48,64	52,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.086.748	176.478.850	50,70	48,00
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	75.222.600	22.536.181	29,96	36,00
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	272.864.148	153.942.669	56,42	60,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.546.400	430.784.400	59,21	60,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	720.046.400	430.784.400	59,83	60,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000		0,00	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	7.500.000	0	0,00	0,00
<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	7.500.000		0,00	0,00
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	7.500.000		0,00	0,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	325.988.458	88.944.800	27,28	15,00
<i>Pencegahan Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota</i>	291.338.458	34.272.400	11,76	15,00
Koordinasi, Singkronisasi dan pelaksanaan perencanaan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air Udara dan laut	281.338.458	30.222.400	10,74	20,00
Koordinasi, Singkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000	4.050.000	40,50	45,00
<i>Pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	34.650.000	20.400.000	58,87	63,00
Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	34.650.000	20.400.000	58,87	63,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	198.841.000	132.291.000	66,53	69,00
<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota</i>	198.841.000	132.291.000	66,53	69,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	101.547.600	68.397.600	67,36	70,00
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	97.293.400	63.893.400	65,67	68,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	9.925.300	475.000	4,79	10,00
<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	9.925.300	475.000	4,79	10,00
Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan Tekhnis Penyimpanan Sementara Limbah B3	9.925.300	475.000	4,79	10,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	30.000.000	2.363.000	7,88	10,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000	2.363.000	7,88	10,00
Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	30.000.000	2.363.000	7,88	10,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	75.000.000	27.094.950	36,13	40,00
<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	75.000.000	27.094.950	36,13	40,00
Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	75.000.000	27.094.950	36,13	40,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	17.000.000	2.581.500	15,19	20,00
<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota</i>	17.000.000	2.581.500	15,19	20,00
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota	17.000.000	2.581.500	15,19	20,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.308.112.200	255.153.400	11,05	55,00
<i>Pengelolaan Sampah</i>	2.308.112.200	255.153.400	11,05	55,00
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan daur ulang dan pemanfaatan kembali	1.800.000.000		0,00	
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	508.112.200	255.153.400	50,22	55,00
JUMLAH	7.059.919.680	2.319.217.826	32,85	36,84

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.521.500	13.065.000	84,17	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.675.500	2.450.000	91,57	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.675.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.675.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.697.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.948.400	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.237.000	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.083.998	1.429.920.318	54,58	54,58
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.960.000	36.480.000	50,00	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	3.350.000	95,71	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000	209.089.100	41,82	41,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.755.000	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	8.695.050	24,84	24,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	2.650.000	13,25	20,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.660.000	67.401.684	54,07	55,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.764.190	32.689.821	39,03	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.813.000	303.971.000	56,84	56,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.891.550	35.876.500	34,87	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	7.000.000	56,00	60,00
Program Pendaftaran Penduduk				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.800.000	-	-	-
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	22.500.000	6.475.000	28,78	30,38
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.500.000			
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	1.500.000	1.081.071	72,07	100,00
Program Pencatatan Sipil	26.250.000			
Pelayanan Pencatatan Sipil	26.250.000			
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	26.250.000	1.600.000	6,10	7,69
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.100.000			
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	26.250.000			
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	26.250.000	3.050.000	11,62	12,82
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	29.850.000			
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	29.850.000	9.256.250	31,01	33,33
JUMLAH	4.294.758.638	2.174.100.794	50,62	58,12

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.14
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.077.450	9.077.450	31,22	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.617.500	10.817.500	36,52	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.265.400	10.565.400	34,91	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.428.500	11.228.500	42,49	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.615.000		0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.375.400	10.675.400	35,14	50,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.960.600		0,00	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.731.506	1.542.838.718	62,17	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.770.000	36.937.500	41,15	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.001.700	4.751.700	47,51	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.508.000		0,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.000.000	0,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	14.934.400		0,00	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan	8.000.000		0,00	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.872.900	58.242.200	20,81	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.000.000	33,33	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.017.243	35.830.212	38,52	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.700.000	8.500.000	26,81	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.436.464	231.811.800	39,66	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.886.600	11.542.500	19,94	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	103.744.900	15.789.000	15,22	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.100.000	8.764.000	32,34	50,00
Program Penataan Desa				
Penyelenggaraan Penataan Desa				
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	55.000.000	7.100.000	12,91	50,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa				
Fasilitasi Kerjasama antar Desa				
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	60.000.000		0,00	50,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	83.716.500	11.853.400	14,16	50,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	156.073.400	11.625.000	0,00	50,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	125.000.000	17.196.000	13,76	50,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	850.000.050		0,00	50,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	57.576.000	10.000.000	17,37	50,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.000.000	25.514.500	51,03	50,00
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				-
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	175.000.000	22.624.000	12,93	50,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	600.000.000	151.035.500	25,17	50,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	135.000.100	15.002.946	11,11	50,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	36.995.000	37,00	50,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000	45.005.100	9,00	50,00
JUMLAH	6.941.409.613	2.364.323.326	34,06	40,79

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	4.278.436.515	2.385.405.552	55,75	
Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.453.700	-	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.298.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.133.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.020.900	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.780.222.930	1.685.208.128	60,61	76,19
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.691.492.380	1.639.962.728	60,93	85,71
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.504.050	45.245.400	51,12	80,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	226.500	-	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.019.600	772.300	11,00	50,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	7.019.600	772.300	11,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.381.100	31.561.950	61,43	70,18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.933.000	1.855.750	47,18	82,35
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	21.927.100	7.142.200	32,57	70,02
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.483.000	22.564.000	88,55	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	1.381.532.685	663.965.849	48,06	65,32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270.000	150.000	55,56	75,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.776.500	14.438.192	38,22	50,00
Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.343.486.185	649.377.657	48,34	65,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah	35.826.500	3.897.325	10,88	40,54

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	4.069.700	270.000	6,63	50,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	29.756.800	1.977.325	6,64	31,75
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.000.000	1.650.000	82,50	100,00
Urusan Wajib				
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana				
Program Pengendalian Penduduk	136.285.800	7.350.000	0,05	
Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	1.720.800	-	0,00	0,00
Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal	1.720.800	-	0,00	0,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134.565.000	7.350.000	5,46	50,00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Sumber Pendanaan	7.365.000	7.350.000	99,80	100,00
Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000	0	0,00	0,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.954.858.600	144.268.300	4,88	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	985.415.000	134.859.750	13,69	0,87
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	4.375.000	-	0,00	0,00
Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Prongram KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	-	0,00	0,00
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	7.500.000	10,62	66,67
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), Mini Lokakarya (Minilok)	218.400.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	627.000.000	127.359.750	20,31	50,00
Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	-	0,00	0,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	958.953.000	1.405.850	0,15	21,31
Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3.753.000	1.405.850	37,46	67,39
Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)	955.200.000	-	0,00	0,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	577.486.300	6.248.400	1,08	34,35
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	44.700.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	475.458.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2.000.000	-	0,00	0,00
Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya	17.400.000	-	0,00	0,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	37.928.300	6.248.400	16,47	59,35
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	433.004.300	1.754.300	0,41	0,16
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	431.250.000	-	0,00	0,00
Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.754.300	1.754.300	100,00	100,00
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kelurga Sejahtera (KS)	3.393.257.600	3.182.000	0,09	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.393.257.600	3.182.000	0,09	5,82
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1.331.490.000	1.595.400	0,12	32,05

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.057.760.000	-	0,00	0,00
Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	4.007.600	1.586.600	39,59	60,00
JUMLAH	10.762.838.515	2.540.205.852	23,60	23,86

16. Dinas Perhubungan

Tabel 2.16
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.600	2.000.600	28,58	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.999.600			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.018.500	2.318.500	33,03	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.500	9.895.200	98,95	98,95
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.904.493.993	1.627.180.491	56,02	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.337.000	50.690.000	42,84	41,67

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.000.800	3.445.000	49,21	41,67
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.000.400			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Pegawai Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.500	5.709.400	38,06	42,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	9.300.000	46,50	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	45.371.782	37,81	37,14
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.080	21.192.233	21,19	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	833.256.500	434.770.000	52,18	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.200.000			
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.200.000			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengembangan sarana dan prasarana Terminal	29.999.900	12.135.000	40,45	50,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.000.000	15.871.100	27,84	27,84
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.000.000			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	47.000.000	6.296.000	13,40	13,40
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.831.800	2.456.800	20,76	20,76
JUMLAH	4.504.840.173	2.256.632.106	50,09	48,73

17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.540.873.542	1.669.443.500	47,15	38,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	51.155.600	56,84	0,50

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.795.700	98,64	1,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	14.978.100	99,85	1,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	6.476.000	43,17	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	14.905.800	99,37	1,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.564.830.792	1.240.842.527	48,38	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.830.792	1.189.349.527	48,45	0,50
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000	42.375.000	47,08	0,46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	9.118.000	45,59	0,45
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	-	0,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	20.400.000	81,60	1,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	20.400.000	81,60	1,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.975.000	129.336.800	41,59	0,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.975.000	10.975.000	100,00	1,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	16.497.000	82,49	0,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	3.488.000	34,88	0,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	6.835.000	34,18	0,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	91.541.800	45,77	0,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.067.750	213.858.573	48,60	0,50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	50,00	0,50

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.750	32.856.923	32,86	0,50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.067.000	180.001.650	53,24	0,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	13.850.000	14,58	0,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	10.950.000	14,60	0,31
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	2.900.000	14,50	0,11
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.515.880.000	805.703.796	53,15	0,30
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.515.880.000	805.703.796	53,15	0,30
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	39.000.000	-	0,00	0,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	317.000.000	237.538.000	74,93	0,50
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	130.000.000	67.900.000	52,23	0,50
Pelayanan Informasi Publik	39.880.000	-	0,00	0,00
Layanan Hubungan Media	940.000.000	500.265.796	53,22	0,50
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	50.000.000	-	0,00	0,00
Program Aplikasi Informatika	3.450.000.000	444.463.787	12,88	0,44
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000.000	185.017.438	6,61	0,50
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	25.837.450	25,84	0,50
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.700.000.000	159.179.988	5,90	0,50
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	259.446.349	39,91	0,39
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	200.000.000	131.131.950	65,57	0,67

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	300.000.000	128.314.399	42,77	0,50
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	150.000.000	-	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	115.000.000	21.384.500	18,60	0,17
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	21.384.500	18,60	0,17
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000	19.018.400	47,55	0,00
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40.000.000	2.366.100	5,92	0,50
Membangun Metadata Statistik Sektoral	35.000.000	-	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	225.000.000	100.899.900	44,84	0,25
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	86.006.000	43,00	0,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	86.006.000	43,00	0,00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	14.893.900	59,58	0,50
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	14.893.900	59,58	0,50
JUMLAH	8.846.753.542	3.041.895.483	34,38	30,91

18. Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 2.18
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.016.922.746	1.819.456.228	60,31%	77,88%
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	67.769.200	30.381.300	44,83%	80,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.098.000	11.198.000	74,17%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.560.600	9.510.500	70,13%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.033.900	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.300	7.750.300	77,50%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.269.500	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7.806.900	1.922.500	24,63%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.394.786.790	1.533.906.572	64,05%	74,29%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.313.609.190	1.504.115.622	65,01%	71%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.177.600	24.569.900	37,13	5583
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/semesteran	15.000.000	5.221.050	34,81	55,23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.920.000	102.499.440	47,25	77,43
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.010.000	3.500.000	69,86	84,34
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.200.000	19.200.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.740.000	3.500.000	16,88	33,54
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	4.200.000	21,00	33,39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.970.000	72.099.440	47,44	73,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.013.556	110.021.116	46,03	66,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	50,00	75,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	42.286.560	13.453.200	31,81	45,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.726.996	95.567.916	49,08	69,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.433.200	42.647.800	43,33	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.968.800	15.802.200	39,54	65,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	39.964.400	17.845.600	44,65	66,54
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.500.000	9.000.000	48,65	70,00
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000	11.030.000	22,06	36,66
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	50.000.000	11.030.000	22,06	36,66
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	11.030.000,00	22,06	36,66
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	50.000.000	10.000.000	20,00	35,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.000.000	10.000.000	20,00	35,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	10.000.000	20,00	35,00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	50.000.000	12.201.149	24,40	34,73
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000	12.201.149	24,40	34,73
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	50.000.000	12.201.149	24,40	34,73
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	178.026.060	82.017.000	46,07	55,56

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	178.026.060	82.017.000	46,07	55,56
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	178.026.060	82.017.000	46,07	55,56
JUMLAH	3.344.948.806	1.934.704.377	57,84	72,57

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.19
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	12.400.000	82,67	90,93
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	12.400.000	82,67	90,93
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.217.158.270	1.270.028.267	57,28	63,01

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.827.000	65.548.300	67,00	73,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.000.000	10.854.500	83,50	91,85
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.000.000	3.115.600	23,97	26,36
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72.568.000	4.042.922	5,57	6,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	2.000.000	18,18	20,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	7.898.700	39,49	43,44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	4.160.800	34,67	38,14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	114.325.792	60,17	66,19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.287.000	37.355.015	23,16	25,48
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	5.400.000	49,09	54,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.880.000	197.450.000	34,17	37,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	23.242.385	38,74	42,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000	7.358.751	52,56	57,82
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000	5.500.000	45,83	50,42

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Lainnya				
Program Pengembang Iklim Penanaman Modal				
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000	4.590.000	9,18	10,10
Program Promosi Penanaman Modal				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	70.000.000	54.252.100	77,50	78,28
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	4.210.000	7,02	7,72
Program Pelayanan Penanaman Modal				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	43.000.000	23.145.600	53,83	53,83
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000	-	-	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	63.300.000	-	-	-
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.000.000	5.463.229	15,61	17,17
JUMLAH	4.739.020.270	1.919.741.961	40,51	44,56

20. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tabel 2.20
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintah Wajib Yg Tdk Berkaitan Dgn Pelayanan Dasar	10.669.101.323			
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	10.669.101.323	4.673.089.371	43,80	43,80
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.812.101.323	1.952.814.371	51,23	51,23
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.124.300	15.784.300	11,11	11,11
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	23.185.300	2.585.300	11,15	11,15
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	23.428.300	2.828.300	12,07	12,07
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	23.476.700	2.876.700	12,25	12,25
Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	24.354.000	3.754.000	15,41	15,41
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	24.340.000	3.740.000	15,37	15,37
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.340.000	-	0,00%	0,00
Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.729.425.023	1.478.017.263	54,15	54,15
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.510.996.323	1.397.012.763	55,64	55,64
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	148.057.200	70.002.700	47,28	47,28
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD	70.371.500	11.001.800	15,63	15,63
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	12.124.000	48,50	48,50
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	25.000.000	12.124.000	48,50	48,50
Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	265.012.000	121.516.100	45,85	45,85
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.000.000	3.129.700	52,16	52,16
Penyediaan bahan logistik kantor	50.325.000	25.122.500	49,92	49,92
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.683.000	28.686.000	56,60	56,60
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	158.004.000	64.577.900	40,87	40,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.132.500	225.651.608	47,29	47,29
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	56.072.500	31.839.708	56,78	56,78

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan jasa layanan umum kantor	421.060.000	193.811.900	46,03	46,03
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	173.407.500	99.721.100	57,51	57,51
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	71.499.500	33.904.600	47,42	47,42
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	81.908.000	55.816.500	68,15	68,15
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	10.000.000	50,00	50,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	1.054.005.300	356.332.300	33,81	33,81
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	1.054.005.300	356.332.300	33,81	33,81
Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota	249.505.300	169.817.700	68,06	68,06
Peyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	804.500.000	186.514.600	23,18	23,18
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.122.994.700	2.213.942.700	43,22	43,22
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.093.150.000	84.649.700	4,04	4,04
Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota	2.093.150.000	84.649.700	4,04	4,04
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.189.844.700	2.007.000.000	91,65	91,65
Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota	319.944.700	137.100.000	42,85	42,85
Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten / Kota	1.869.900.000	1.869.900.000	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	840.000.000	122.293.000	14,56	14,56
Penyelenggaraan, pengembangan dan	840.000.000	122.293.000	14,56	14,56

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
permasalahan festival dan olahraga rekreasi				
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	680.000.000	150.000.000	22,06	22,06
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>680.000.000</i>	<i>150.000.000</i>	22,06	22,06
Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	680.000.000	150.000.000	22,06	22,06
JUMLAH	10.669.101.323	4.673.089.371	43,80	43,80

21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.21
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.663.369.351	2.134.221.675	45,77	45,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.158.950	39.058.000	31,97	31,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.215.300	10.137.900	43,67	43,67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.166.250	1.761.450	12,43	12,43
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.135.500	6.270.400	32,77	32,77
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.079.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.775.600	3.493.200	22,14	22,14
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	18.412.600	6.068.850	32,96	32,96
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.374.200	11.326.200	61,64	61,64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.183.983.081	1.363.581.061	62,44	62,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.096.025.881	1.317.361.261	62,85	62,85
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.957.200	46.219.800	52,55	52,55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.781.920	158.540.076	44,56	44,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.170.000	5.398.000	75,29	75,29

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.335.920	30.566.518	60,73	60,73
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.250.000	8.440.000	39,72	39,72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.026.000	96.135.558	37,11	37,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.884.500	202.074.197	48,24	48,24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	800.000	41,03	41,03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	47.334.500	16.474.197	34,80	34,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.600.000	184.800.000	50,00	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.955.700	50.914.741	38,58	38,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.155.700	42.032.348	40,36	40,36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.800.000	8.882.393	31,95	31,95
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.747.600	-	-	-
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan	84.747.600	-	-	-
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah Kabupaten/kota	287.522.900	44.651.600	15,53	15,53
Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	227.177.500	44.651.600	19,65	19,65
Pembinaan Sumber daya manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	60.345.400	-	-	-
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/kota	1.018.007.200	259.728.900	25,51	25,51
Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.018.007.200	259.728.900	25,51	25,51
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	60.327.500	15.673.100	25,98	25,98
Perlindungan Cagar Budaya	60.327.500	15.673.100	25,98	25,98
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	184.763.400	56.552.623	30,61	30,61
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.044.200	39.601.123	39,58	39,58
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.044.200	39.601.123	39,58	39,58
Pengelolaan Kawasan Strategis	39.090.100	10.187.400	26,06	26,06

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pariwisata Kabupaten/kota				
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.090.100	10.187.400	26,06	26,06
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	45.629.100	6.764.100	14,82	14,82
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	45.629.100	6.764.100	14,82	14,82
Program Pemasaran Pariwisata	119.204.100	33.886.900	28,43	28,43
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	119.204.100	33.886.900	28,43	28,43
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	63.267.300	20.867.300	32,98	32,98
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi pariwisata Kabupaten /Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	55.936.800	13.019.600	23,28	23,28
JUMLAH	4.967.336.851	2.224.661.198	44,79	44,79

22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.22
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.751.277.244	1.534.366.192	55,77	55,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.097.150	9.282.950	13,84	168,38
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	17.660.950	2.538.150	14,37	14,37
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.644.800	1.344.800	8,60	8,60
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.716.100	600.000	22,09	22,09
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.648.600	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.716.100	1.500.000	55,23	55,23

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.940.300	1.500.000	30,36	30,36
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.770.300	1.800.000	37,73	37,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.139.822	1.333.405.991	60,94	150,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.121.232.122	1.301.103.291	61,34	61,34
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.189.300	27.784.300	50,34	50,34
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	11.718.400	4.518.400	38,56	38,56
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.145.400	3.000.000	36,83	36,83
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.145.400	3.000.000	36,83	36,83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.731.900	2.997.500	30,80	30,80
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	9.731.900	2.997.500	30,80	30,80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.770.472	37.293.198	33,37	147,70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.965.372	1.500.000	50,58	50,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.070.000	2.500.000	41,19	41,19
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	6.920.200	1.500.000	21,68	21,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.814.900	31.793.198	34,25	34,25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.382.600	121.946.553	42,00	133,95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.585.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	24.552.500	14.546.553	59,25	59,25
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.357.400	2.800.000	33,50	33,50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.887.700	104.600.000	41,20	41,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.009.900	26.440.000	41,06	110,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.093.700	23.440.000	41,06	41,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	16.416.200	1.500.000	9,14	9,14

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Mesin lainnya	2.500.000	1.500.000	60,00	60,00
Program Pembinaan Perpustakaan	314.256.600	24.977.600	7,95	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.292.400	16.014.900	7,27	27,64
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.424.200	8.497.600	21,55	21,55
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.016.900	-	0,00	0,00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	123.498.100	7.517.300	6,09	6,09
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	26.353.200	-	0,00	0,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.964.200	8.962.700	9,54	32,47
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25.266.600	7.762.700	30,72	30,72
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	68.697.600	1.200.000	1,75	1,75
Program Pengelolaan Arsip	113.558.100	4.938.300	4,35	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	26.276.800	1.701.800	6,48	6,48
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	26.276.800	1.701.800	6,48	6,48
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	39.332.000	2.586.000	6,57	6,57
Akuisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	39.332.000	2.586.000	6,57	6,57
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	47.949.300	650.500	1,36	1,36
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	47.949.300	650.500	1,36	1,36
JUMLAH	3.179.091.944	1.564.282.092	49,21	49,21

23. Dinas Perikanan

Tabel 2.23
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perikanan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.200	8.445.700	56,30	56,30
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.049.200	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.014.500	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.003.100	10.003.100	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.100	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.052.800	12.402.800	95,02	95,02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	949.300	9,49	9,49
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.988.690.507	1.709.633.876	57,20	58,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.040.000	33.250.000	43,16	43,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.999.950	-	0,00	0,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.529.900	4.279.900	56,84	56,84
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	9.847.800	924.800	9,39	9,39
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.998.100	5.858.100	58,59	58,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.634.900	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.920.000	5.745.000	48,20	48,20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.982.500	5.302.500	53,12	53,12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	29.999.000	10.459.000	34,86	34,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.569.800	73.194.625	51,70	51,70
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	32.487.400	-	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.999.598	32.353.499	52,18	56,77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.380.618	166.900.618	50,52	56,77
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.018.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000	7.000.000	75,27	75,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.188.000	105.850.000	99,68	100,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	25.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	527.155.000	7.172.200	1,36	5,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau tenaga Kerja Asing	15.000.000	-	0,00	0,00
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	855.000.000	12.051.300	1,41	13,00
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000	8.704.400	34,82	34,82
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	24.999.900	11.259.900	45,04	45,04
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.486.900	6.574.500	0,46	10,00
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.200	-	0,00	0,00
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil perikanan				
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.001.900	5.699.400	37,99	37,99

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	11.670.600	46,68	46,68
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota				
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	-	0,00	0,00
JUMLAH	7.078.349.873	2.255.685.118	31,87	35,71

24. Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel 2.24
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	18.996.354.308	9.575.269.937	50,41	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.521.200	144.666.500	43,51	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.420.000	12.084.000	20,00	80,00
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	105.176.000	93.000.000	88,42	90,00
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.107.700	1.535.500	8,98	25,00
Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	16.282.300	0	0,00	25,00
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.360.000	0	0,00	25,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.913.700	22.691.000	34,96	30,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.261.500	15.356.000	27,29	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.647.845.573	8.889.217.850	53,40	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	16.489.494.673	8.821.960.850	53,50	49,98
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.179.900	67.257.000	45,70	49,98
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.171.000	0	0,00	49,99
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11.544.800	4.353.800	37,71	
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	11.544.800	4.353.800	37,71	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.624.700	91.610.221	17,94	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	224.500.000	0	0,00	15,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.002.400	12.466.000	47,94	54,28
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	31.222.800	17.043.700	54,59	61,34
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	52.594.000	12.563.000	23,89	41,66
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	176.305.500	49.537.521	28,10	35,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.666.400	0	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.000.000	0	0,00	30,00
Pengadaan Mebel	391.666.400	0	0,00	30,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.982.035	439.806.566	49,31	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	95.793.120	42.839.920	44,72	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	796.188.915	396.966.646	49,86	49,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.169.600	5.615.000	6,83	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.765.800	3.170.000	7,08	29,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan	37.403.800	2.445.000	6,54	29,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.719.170.850	215.260.950	7,92	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	119.413.250	38.584.000	32,31	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	42.087.750	15.792.000	37,52	51,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	77.325.500	22.792.000	29,48	45,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	419.543.250	68.930.950	16,43	
Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	99.930.000	29.497.800	29,52	41,43
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	129.349.850	8.520.950	6,59	15,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	190.263.400	30.912.200	16,25	50,00
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	300.000.000	0	0,00	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	300.000.000	0	0,00	20,00
Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	209.051.400	104.938.500	50,20	
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak	209.051.400	104.938.500	50,20	30,00
Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.671.162.950	2.807.500	0,17	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.671.162.950	2.807.500	0,17	50,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.170.506.100	0	0,00	
Pembangunan Prasarana Pertanian	6.170.506.100	0	0,00	
Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.447.685.500	0	0,00	30,00
Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.950.000.000	0	0,00	30,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	943.833.600	0	0,00	30,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	828.987.000	0	0,00	30,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	924.851.000	121.923.500	13,18	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	687.306.200	110.342.500	16,05	
Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis	82.800.700	1.262.500	1,52	25,00
Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	604.505.500	109.080.000	18,04	10,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000	0	0,00	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	200.000.000	0	0,00	25,00
Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	37.544.800	11.581.000	30,85	
Pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan	37.544.800	11.581.000	30,85	50,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	71.689.800	32.492.400	45,32	
Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	71.689.800	32.492.400	45,32	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	71.689.800	32.492.400	45,32	50,55
Program Penyuluhan Pertanian	3.308.017.900	1.323.382.400	40,01	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.308.017.900	1.323.382.400	40,01	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	99.400.000	0	0,00	25,00
Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.561.243.900	1.218.360.500	47,57	50,00
Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	647.374.000	105.021.900	16,22	30,00
JUMLAH	32.190.589.958	11.268.329.187	35,01	39,24

25. Dinas Perkebunan

Tabel 2.25
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perkebunan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.702.700	7.155.850	26,80	27,90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.648.300	8.386.950	38,74	80,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.888.300	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.254.500	19.386.500	83,37	97,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.133.700	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	63.931.700	8.316.750	13,01	21,94
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000	-	-	6,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.304.193.995	1.974.676.338	59,76	59,76
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.555.900	42.744.400	39,38	39,92

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	22.059.500	3.311.550,00	15,01	32,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.609.500	2.542.700	12,97	17,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	22.640.000	-	-	50,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.441.800	11.957.400	28,85	38,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	43.960.100	19.985.100	45,46	50,06
Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.010.700	48.767.849	40,64	50,19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.175.480	21.388.792	46,32	47,61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.503.220	245.828.980	49,61	49,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.318.600	56.144.340	36,38	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.546.500	37.198.200,00	38,93	38,93
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	440.000.000	14.386.900	3,27	6,10
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
Pengembangan Prasarana Pertanian				
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	115.332.000	7.739.000,00	6,71	8,18
Pembangunan Prasarana Pertanian				
Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.850.000.000	-	-	0,32
Program Pengendalian dan				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penanggulangan Bencana				
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Holtikultura dan Perkebunan	52.667.500	11.063.000	21,01	40,93
Program Perizinan Usaha Pertanian				
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah				
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	85.000.000	34.429.200,00	40,50	41,97
JUMLAH	8.228.573.995	2.575.409.799	31,30	35,67

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.26
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.986.956.723	2.254.287.917	45,20	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.795.292	31.614.100	39,13	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.295.992	20.176.400	60,60	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.499.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.499.950	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.499.750	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.700	6.099.700	81,33	50,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	5.338.000	53,38	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.914.785.523	1.793.717.905	61,54	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.832.416.723	1.773.352.205	62,61	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.725.000	18.434.200	25,35	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9.643.800	1.931.500	20,03	33,33
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.131.300	2.775.000	24,93	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.131.300	2.775.000	24,93	100,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	29.915.300	-	0,00	0,00
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.915.300	-	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.868.000	1.888.700	4,74	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.868.000	1.888.700	4,74	0,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.932.500	66.771.200	20,87	0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.299.800	4.197.200	27,43	20,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.292.750	2.559.800	24,87	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.497.600	9.682.400	25,15	30,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60.842.650	15.800.000	25,97	0,69
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.999.700	34.531.800	23,02	40,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.077.058	308.820.292	40,58	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	600.000	24,00	20,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.940.770	27.759.619	40,86	66,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	690.636.288	280.460.673	40,61	95,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.999.850	11.267.100	7,77	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.999.850	8.960.500	7,17	22,22
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	2.306.600	11,53	30,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	539.451.550	-	0,00	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	35.000.000	-	0,00	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	-	0,00	0,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	35.000.000	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	29.045.600	-	0,00	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29.045.600	-	0,00	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29.045.600	-	0,00	0,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	149.996.950	-	0,00	
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	149.996.950	20.792.723	13,86	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.999.950	2.431.973	6,95	0,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40.000.000	5.915.950	14,79	0,00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	74.997.000	12.444.800	16,59	28,57
Program Pengembangan Ekspor	150.000.000	-	0,00	
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota	150.000.000	-	0,00	0,00
Pameran Dagang Nasional	150.000.000	-	0,00	0,00
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	175.409.000		0,00	
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	175.409.000	16.640.897	9,49	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	110.409.000	16.640.897	15,07	2,06
Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	65.000.000	-	0,00	0,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	110.000.350	-	0,00	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	110.000.350	-	0,00	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	110.000.350	-	0,00	0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	35.000.300	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75.000.050	-	0,00	0,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	35.000.000	-	0,00	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	-	0,00	0,00
Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	35.000.000	-	0,00	0,00
JUMLAH	4.986.956.723	2.254.287.917	45,20	26,14

27. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.27
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Perekonomian dan Pembangunan				
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	133.862.400	42.971.400	32,10%	50,00%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	216.563.000	63.264.300	29,21%	50,00%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	102.540.000	40.791.300	39,78%	50,00%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	134.223.600	18.063.300	13,46%	25,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	53.337.500	22.560.878	42,30%	50,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	49.018.500	17.153.600	34,99%	50,00%
JUMLAH	689.545.000	204.804.778	29,70%	45,83%

28. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Tabel 2.28
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
Administrasi Tata Pemerintahan				
Penataan Administrasi Pemerintahan	400.000.000	205.297.000	51	45
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	309.000.000	77.674.200	25	38
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	424.400.000	57.019.000	13,44	45,00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100.600.000	41.265.300	41,02	30,00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	55.000.000	4.340.000	7,89	29,90
JUMLAH	1.289.000.000	385.595.500	29,91	32,51

29. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 2.29
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
Fasilitasi Keprotokolan	1.729.599.000	457.490.349	26,45%	28,13%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	390.438.000	135.869.800	34,80%	0,00%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	820.463.000	255.676.904	31,16%	37,06%
JUMLAH	2.940.500.000	849.037.053	28,87%	19,81%

30. Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.30
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Bagian Organisasi

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penataan Organisasi				
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	232.070.950	81.324.200	35,04%	0,00%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	122.136.100	47.259.800	38,69%	10,00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	190.089.000	82.940.600	43,63%	0,00%
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	61.963.100	32.650.350	52,69%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	43.740.850	35.547.850	81,27%	100,00%
JUMLAH	279.722.800	279.722.800	100,00%	24,38%

31. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.31
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
Fasilitasi Pengolaan Bina Mental Spiritual	12.943.000.000	5.048.898.400	39,01%	66,67%
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	75.000.000	2.200.000	2,93%	0,00%
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	75.000.000	1.500.000	2,00%	0,00%
JUMLAH	13.093.000.000	5.052.598.400	38,59%	31,35%

32. Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.32
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000	57.112.819	45,69%	71,43%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	9.250.000	30,83%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	6.245.650	41,64%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	2.850.000	29%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	3.971.950	39,72%	100,00%
Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000	11.432.850	91,46%	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.500.000	5.023.800	28,71%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.082.719.176	7.104.761.652	58,80%	50,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	523.892.800	211.600.650	40,39%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	75.000.000	36.291.350	48,39%	25,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.000.000	14.197.500	26%	25%
JUMLAH	12.956.611.976	7.462.738.221	57,60%	65,58%

33. Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.33
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
Sub Kegiatan :				
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	203.154.000	83.688.000	41,19	63,33
Fasilitasi Bantuan Hukum	563.078.000	190.908.000	33,90	40,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	528.473.000	234.598.000	44,39	50,00
JUMLAH	1.294.705.000	509.194.000	39,33	44,75

34. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.34
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1.146.421.000	361.091.641	31%	42%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	146.421.000	77.672.600	53%	0%
Pengelola Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	146.421.000	66.464.500	45%	0%
JUMLAH	1.439.263.000	505.228.741,00	35,10%	10,42%

35. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.35
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Perekonomian Dan Pembangunan				
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa				
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	381.281.700	98.928.000	26	26
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	216.327.000	56.707.100	26	26
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	367.332.350	52.018.200	14	14
JUMLAH	964.941.050	207.653.300	22	22

36. Bagian Umum Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.36
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Umum Setda Kab. Musi Rawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.100.000	173.013.200	91,01%	100,00 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	44.320.000	29,55%	29,55%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	85.250.000	42,63%	58,82%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	30.790.000	30,79%	30,78%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	50.000.000	25,00%	25,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	246.000.000	64.800.000	26,34%	25,88%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	231.869.200	30,92%	31,03%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000.000		0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	480.000.000	69.550.000	14,49%	6,45%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	2.700.000	27,00%	100,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.482.572.800	441.104.035	29,75%	29,76%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	799.600.000	284.860.000	35,63%	35,86%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.813.040.000	1.390.599.200	28,89%	100,00 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000	433.485.000	43,35%	42,11%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000	588.757.175	58,88%	59,46%
Pemeliharaan Mebel	100.000.000	39.000.000	39,00%	39,42%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	138.050.000	55,22%	55,29%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	63.275.000	63,28%	63,28%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	121.475.000	48,59%	48,59%
Administrasi Keuangan dan Operator Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	199.965.280	80.561.876	40,29%	100,00 %
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.400.000	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.000.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	300.000.000	50,00%	50,00%
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.576.722.600	1.524.846.000	42,63%	41,67%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	950.000.000	367.400.000	38,67%	38,67%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	510.100.000	231.305.000	45,35%	45,34%
JUMLAH	22.138.000.680	6.757.010.686	30,52	42,31%

37. SEKRETARIAT DPRD

Tabel 2.37
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.016.598.037	19.147.554.679	39,88	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.023.981.165	2.098.720.228	29,88	3,57
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.850.000	0	0,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.195.512.000	185.970.000	15,56	57,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.368.865.651	779.414.067	32,90	60,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	832.250.000	3.872.000	0,47	40,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemerintahan Daerah				
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	33.740.742.821	15.244.728.384	45,18	50,00
Layanan Administrasi DPRD	2.705.396.400	834.850.000	30,86	50,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.815.150.979	15.427.051.285	34,42	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.757.090.175	2.127.543.602	31,49	50,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	10.687.363.800	1.998.040.752	18,70	50,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.344.009.600	0	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	5.468.808.000	894.264.000	16,35	6,25
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.924.162.400	604.533.200	31,42	50,00
Fasilitasi Tugas DPRD	17.633.717.004	9.802.669.731	55,59	50,00
JUMLAH	92.831.749.016	34.574.605.964	37,24	32,07

38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2.38
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Mura	4.837.649.011	2.379.665.733	49,19%	19,67%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.285.400	11.853.975	14,58%	14,28%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.199.500	1.323.875	14,39%	14,39%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.742.500	677.500	7,75%	7,75%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.226.200	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.049.200	3.000.000	33,15%	33,15%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11.505.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.563.000	6.852.600	30,37%	30,37%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.156.811.311	1.883.880.857	59,68%	42,34%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.023.174.811	1.831.685.457	60,59%	60,59%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	112.727.400	47.026.800	41,72%	41,72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20.909.100	5.168.600	24,72%	24,72%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.136.900	2.641.700	28,91%	28,91%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.136.900	2.641.700	28,91%	28,91%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.304.000	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.304.000	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	898.484.670	233.187.304	25,95%	9,27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.508.720	8.000.000	43,22%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.500.000	13.500.000	4,23%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.113.900	1.500.000	6,78%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.872.850	2.499.700	36,37%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	47.350.000	52,61%	20,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.489.200	160.337.604	36,32%	35,63%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.461.230	218.833.274	42,05%	42,88%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.430.000	650.000	45,45%	45,45%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.210.200	35.277.244	40,92%	40,92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.821.030	182.906.030	42,26%	42,26%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.165.500	29.268.623	19,62%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.568.500	24.025.735	32,66%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.097.000	4.117.888	6,23%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	1.125.000	11,84%	0,00%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	780.850.900	232.377.654	29,76%	27,81%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	459.802.900	187.900.410	40,87%	54,25%
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	122.964.400	13.537.576	11,01%	0,00%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.828.900	30.434.900	84,95%	84,95%
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	38.922.200	30.014.500	77,11%	77,11%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	96.576.400	63.191.600	65,43%	65,43%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	23.558.700	17.583.700	74,64%	74,64%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	141.952.300	33.138.134	23,34%	23,34%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	128.313.000	1.500.000	1,17%	0,00%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	128.313.000	1.500.000	1,17%	0,00%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	192.735.000	42.977.244	22,30%	29,18%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	62.313.200	30.319.944	48,66%	48,66%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	130.421.800	12.657.300	9,70%	9,70%
Program Koordinasi Dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.239.333.400	310.022.448	25,02%	22,52%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	421.142.000	104.995.799	24,93%	17,28%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	80.000.000	42.871.800	53,59%	53,59%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	5.364.900	17,88%	17,88%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	70.000.000	32.968.700	47,10%	47,10%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	-	0,00%	0,00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	121.142.000	23.790.399	19,64%	19,64%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	383.813.400	60.668.136	15,81%	18,15%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJP, RPJMD dan RKPD)	57.750.000	13.207.150	22,87%	22,87%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52.500.000	10.118.300	19,27%	19,27%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	63.000.000	11.433.500	18,15%	18,15%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	210.563.400	25.909.186	12,30%	12,30%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	434.378.000	144.358.513	33,23%	32,14%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD dan RKPD)	63.728.000	40.987.500	64,32%	64,32%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	3.375.000	13,50%	13,50%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	125.000.000	47.684.579	38,15%	38,15%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	70.650.000	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000	10.943.300	43,77%	43,77%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125.000.000	41.368.134	33,09%	33,09%
JUMLAH	6.857.833.311	2.922.065.835	42,61%	23,33%

39. Badan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.39
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Penelitian dan Pengembangan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Penelitian Dan Pengembangan	4.132.449.743	1.563.249.359	37,83	41,28
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.211.899.743	1.508.086.463	46,95	47,94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.559.000	0	0,00	36,68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.218.000	0	0,00	10,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.043.600	0	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.943.600	0	0,00	10,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.842.400	0	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.782.400	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.783.000	0	0,00	10,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.946.000	0	0,00	10,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.281.687.263	1.282.236.845	56,20	56,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.221.102.263	1.256.176.845	56,56	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.068.000	26.060.000	46,48	20,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.517.000	0	0,00	23,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.253.500	0	0,00	30,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.253.500	0	0,00	30,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.869.600	0	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.869.600	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.765.500	81.088.301	29,09	20,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.405.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.520.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.938.400	0	0,00	33,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000	0	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.902.100	81.088.301	36,22	22,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.450.000	0	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.450.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.379.830	123.971.317	38,34	49,62
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.125.000	0	0,00	20,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.025.930	33.251.317	32,59	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.228.900	90.720.000	41,76	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.935.050	20.790.000	23,64	27,28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.774.650	10.960.000	22,94	25,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.160.400	9.830.000	27,96	30,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	0	0,00	30,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	920.550.000	55.162.896	5,99	18,02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	395.550.000	34.762.800	8,79	29,89
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	130.000.000	2.333.000	1,79	40,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	99.825.900	18.043.400	18,07	20,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.174.100	14.386.400	14,36	20,00
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	65.550.000	0	0,00	40,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	125.000.000	0	0,00	5,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	60.000.000	0	0,00	5,00
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	65.000.000	0	0,00	5,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000	10.091.096	5,05	10,00
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200.000.000	10.091.096	5,05	10,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	200.000.000	10.309.000	5,15	10,70
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	70.000.000	0	0,00	5,00
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	60.000.000	0	0,00	10,00
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	70.000.000	10.309.000	14,73	17,00
JUMLAH	4.132.449.743	1.563.249.359	37,83	41,28

40. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.40
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Keuangan	334.338.762.236		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.029.162.938		-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.400.000		-	
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	1.800.000	40,00	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.000.000	3.485.000	58,08	300,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000	1.500.000	30,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	4.400.000	88,00	300,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	6.190.000	88,43	66,67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.900.000	2.400.000	61,54	25,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.639.917.738		-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.325.395.938	9.262.524.368	27,79	42,86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	307.030.000	138.550.000	45,13	41,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.491.800	3.204.250	42,77	46,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.508.200		-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.508.200	3.587.050	47,78	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000		-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000	67.456.000	96,37	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.220.050		-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.903.000	98,06	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	4.450.000	29,67	50,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.656.050	10.545.000	98,96	50,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	15.724.450	52,41	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	20.000.000	4.950.000	24,75	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.564.000	51.599.021	51,31	60,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	787.079.000		-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.305.000	26,10	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	161.949.000	67.892.522	41,92	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	13.800.000	69,00	70,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.130.000	250.710.000	41,78	41,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312.037.950		-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.694.000	54.848.125	59,17	60,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.343.950	12.125.350	62,68	50,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	-	-
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	298.409.599.298		-	-
Korrdinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	2.248.025.000		-	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	130.000.000	10.228.400	7,87	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.000.000	12.732.600	8,49	-
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	60.000.000	4.762.500	7,94	62,00
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	76.775.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100.000.000	16.033.900	16,03	62,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300.000.000	16.154.250	5,38	-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	331.250.000	81.572.100	24,63	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000	17.157.600	11,44	-
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.000.000	5.484.550	10,97	50,00
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000	263.043.700	29,23	41,67
Korrdinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	646.064.000		-	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Korrdinasi , Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Suprvisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	225.000.000	76.719.050	34,10	50,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	421.064.000	57.548.050	13,67	-
Korrdinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	700.000.000		-	
Korrdinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	90.000.000	51.224.200	56,92	41,18
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.000.000	125.524.443	62,76	62,50
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	200.000.000	91.585.900	45,79	50,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	90.000.000	16.823.800	18,69	20,00
Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000	24.626.954	49,25	50,00
Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	70.000.000	47.329.652	67,61	50,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	294.315.510.298		-	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	267.590.612.200	122.880.995.722	45,92	40,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14.828.192.192		-	-
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.896.705.906			-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	500.000.000		-	
Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Kkeuangan Daerah	500.000.000	125.291.650	25,06	50,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	900.000.000		-	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	900.000.000		-	
Penyusunan Standar Harga	60.219.200	6.457.600	10,72	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.172.300		-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	76.900.900	20.053.400	26,08	33,33

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Inventarisasi Barang Milik Daerah	167.916.000	102.644.100	61,13	-
Penilaian Barang Milik Daerah	86.307.000	7.674.200	8,89	-
Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	340.263.500	81.773.288	24,03	25,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	155.221.100	24.966.200	16,08	-
JUMLAH	334.338.762.236	134.156.356.945	40,13	41,91

41. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 2.41
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.991.980.858	3.050.125.369	33,92	50,44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.773.250	98.038.000	51,12	68,59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.014.000	23.716.600	81,74	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.293.850	23.696.600	56,03	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.465.400	50.624.800	42,02	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.312.019.668	2.165.795.222	29,62	49,97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.201.046.168	2.114.301.722	29,36	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.280.000	35.100.000	47,25	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36.693.500	16.393.500	44,68	44,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.057.460	70.964.815	23,73	21,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.032.660	5.299.100	37,76	33,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.960.000	7.629.840	44,99	41,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.500.000	6.530.000	30,37	25,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.564.800	51.505.875	26,61	25,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.564.000	384.200.000	82,52	75,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	465.564.000	384.200.000	82,52	75,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	643.764.480	309.110.382	48,02	48,32
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.564.480	38.350.382	45,35	41,67
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	4.000.000	26,67	25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.200.000	266.760.000	49,02	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.802.000	22.016.950	27,59	29,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.772.000	7.232.500	45,86	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.030.000	14.784.450	23,09	25,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	777.200.100	172.214.937	22,16	22,73
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	777.200.100	172.214.937	22,16	22,73
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	127.169.200	40.432.700	31,79	33,33
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.144.700	15.586.100	22,87	25,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	148.649.400	31.470.000	21,17	25,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	189.260.100	1.194.600	0,63	0,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	64.420.700	26.548.834	41,21	41,67
Penagihan Pajak Daerah	79.656.000	21.415.450	26,88	25,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.884.600	16.821.659	36,66	33,33

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	54.015.400	18.745.594	34,70	33,33
JUMLAH	9.769.180.958	3.222.340.306	32,98	25,07

42. Inspektorat

Tabel 2.42
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Inspektorat

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota				
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	43.038.200	7.375.000	17,14	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.250.000	0	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.350.000	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16.250.000	5.250.000	32,31	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	24.350.000	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	69.190.000	3.980.000	5,75	50,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.699.900	1.200.000	5,06	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.784.045.577	3.727.673.276	47,89	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.437.000	69.540.000	50,97	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	38.813.700	22.462.845	57,87	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.843.400	5.907.500	18,55	0,00
Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.400.000	0	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	884.103.000	243.164.554	27,50	15,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44.002.000		0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	82.578.000	14.105.204	17,08	12,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	8.850.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	747.655.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.476.500	24.630.000	22,92	20,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	62.605.000	25.000.000	39,93	33,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	14.500.000	7.790.000	53,72	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.815.000	100.939.064	30,06	6,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	479.654.000	0	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	50.000.000	0	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bagunan Lainnya	12.385.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.840.000	4.000.000	82,64	100,00
Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber daya Air dan Listrik	171.849.000	58.442.020	34,01	40,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.659.640	137.100.000	40,72	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	88.574.400	3.799.000	4,29	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas operasional Lapangan	336.927.000	68.078.276	20,21	33,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.000.000	19.500.000	31,97	16,67
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	132.312.000	9.300.000	7,03	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.387.250	33.187.250	84,26	0,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.182.433.200	451.561.130	38,19	20,20
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	272.400.000	262.505.000	96,37	39,39
Reviu Laporan Kinerja	42.593.200	19.695.000	46,24	100,00
Reviu Laporan Keuangan	74.596.800	64.124.300	85,96	100,00
Pengawasan Desa	759.672.400	591.581.400	77,87	2,08
Kerja Sama Pengawasan Internal	347.902.500	84.769.889	24,37	1180,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP	288.942.500	248.032.170	85,84	241,67
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	140.000.000	3.480.000	2,49	0,00
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	472.324.000	125.287.000	26,53	13,33
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	152.351.000	68.248.400	44,80	50,00
Pendampingan dan Asistensi				
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	159.154.800	134.500.300	84,51	11,76
Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	232.545.200	111.411.300	47,91	6,25
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	276.631.000	52.971.441	19,15	0,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	394.511.000	158.857.071	40,27	0,00
JUMLAH	17.075.898.167	6.969.448.390	40,81	34,81

43. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.43
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.814.566.274	2.365.374.202	49,13	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.000.000	7.633.000	8,12	36,17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.000	7.633.000	31,80	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.317.637.498	2.024.048.468	61,01	64,54
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.216.137.498	1.989.728.468	61,87	65,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.500.000	34.320.000	42,11	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-	-	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.000.000	-	-	25,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000	-	-	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.000	10.051.900	5,91	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	170.000.000	10.051.900	5,91	6,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.978.000	121.159.267	22,82	43,98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.975.000	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.003.000	7.816.800	45,97	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	10.983.750	31,38	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	23.849.500	23,85	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.000.000	78.509.217	24,92	50,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	-	-	-
Pengadaan Mebel	30.000.000	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.440.776	167.511.567	38,38	50,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	488.200	16,27	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.640.776	51.033.867	29,73	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.800.000	115.989.500	44,30	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.510.000	34.970.000	17,98	32,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.270.000	14.910.000	19,05	25,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.240.000	9.660.000	17,18	25,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	10.400.000	17,33	50,00
Program Kepegawaian Daerah	1.303.000.000	189.906.449	14,57	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	505.000.000	74.254.218	14,70	127,31
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20.000.000	946.000	4,73	-
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	320.000.000	40.420.454	12,63	171,43
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	38.000.000	11.887.764	31,28	77,65
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	127.000.000	21.000.000	16,54	51,03
Mutasi dan Promosi ASN	611.000.000	94.974.497	15,54	37,75
Pengelolaan Mutasi ASN	143.114.000	31.100.100	21,73	115,33
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	107.900.000	37.085.830	34,37	60,80
Pengelolaan Promosi ASN	359.986.000	26.788.567	7,44	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengembangan Kompetensi ASN	80.000.000	10.165.500	12,71	10,50
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000	10.165.500	20,33	-
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	30.000.000	-	-	28,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	107.000.000	10.512.234	9,82	34,53
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	34.000.000	1.149.000	3,38	55,00
Pembinaan Disiplin ASN	73.000.000	9.363.234	12,83	25,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.731.009.000	220.315.324	12,73	
Pengembangan Kompetensi Teknis	591.834.000	38.456.250	6,50	17,64
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	208.834.000	17.948.798	8,59	50,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	383.000.000	20.507.452	5,35	-
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.139.175.000	181.859.074	15,96	44,20
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	213.000.000	173.220.374	81,32	99,20
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	487.800.000	2.624.800	0,54	-
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga	438.375.000	6.013.900	1,37	66,67

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
JUMLAH	7.848.575.274	2.775.595.975	35,36	38,53

44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.44
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.626.600	19.682.100	44,10%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	7.676.600	7.676.600	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	7.934.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	7.676.600	7.676.600	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	7.934.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Lap. Kinerja dan Ikhtas Realisasi kerja SKPD	41.089.500	2.079.200	5,06%	41,67%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.720.500	-	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.290.813.622	1.278.204.257	55,80%	42,86%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.091.100	19.226.200	47,96%	41,67%
Koordinasi dan Penyusunan	10.863.700	5.096.200	46,91%	50,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Lap.Keuangan Bulanan/ TW/Semester SKPD				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.725.400	6.115.200	48,06%	50,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.487.000	6.307.000	54,91%	50,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.847.500	1.982.500	51,53%	50,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	3.000.000	25,00%	25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.552.000	63.438.500	31,17%	63,69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.500.000	50,00%	60,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.703.000	24.503.536	33,25%	50,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.309.150	153.923.000	48,97%	50,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.988.500	47.441.500	40,21%	45,45%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	15.000.000	65,22%	57,14%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				
Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	143.516.200	54.454.600	37,94%	30,00%
Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	113.510.600	-	0,00%	0,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Peran Partai Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101.321.300	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi politik	1.131.271.400	7.861.881	0,69%	10,00%
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	241.760.000	29.249.792	12,10%	42,86%
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	138.737.400	84.577.500	60,96%	61,54%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	217.297.500	44.526.200	20,49%	24,24%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini.Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	108.257.600	43.488.000	40,17%	33,33%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	192.142.800	2.758.500	1,44%	8,33%
JUMLAH	5.644.853.572	1.929.768.866	34,19%	48,23%

45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.45
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.621.100		-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.621.100		-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	890.969.916	444.967.852	49,94	49,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.086.500	25.886.500	44,57	44,57
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.205.000	6.848.000	24,28	24,28
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.456.400	1.050.000	4,12	4,12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.957.500	40.944.360	36,25	36,25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.820.400	9.152.828	30,69	30,69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	505.924.390	315.600.000	62,38	62,38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.522.000	31.740.000	38,46	38,46
Program Penanggulangan Bencana				-
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	242.783.400	115.901.000	47,74	47,74
JUMLAH	1.997.967.706	992.090.540	49,65	49,65

46. Kecamatan STL Ulu Terawas

Tabel 2.46
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.678.473.712	906.357.507	54,00	54,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.370.395.512	780.921.854	56,99	56,99
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.315.025.112	753.754.854	57,32	64,32
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	55.370.400	27.167.000	49,06	49,06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.229.200	37.495.200	35,63	35,63
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.138.200	8.138.200	100,00	100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.616.000	10.682.000	84,67	84,67
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	0	0,00	25,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.475.000	18.675.000	28,96	50,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.240.200	71.563.124	46,10	46,10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.716.500	1.843.124	21,15	21,15
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	146.523.700	69.720.000	47,58	47,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.608.800	16.377.329	34,40	34,40
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35.708.800	16.377.329	45,86	45,86
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.900.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	244.681.100	77.101.100	31,51	31,51
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.241.100	21.241.100	100,00	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.241.100	21.241.100	100,00	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	223.440.000	55.860.000	25,00	25,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.440.000	55.860.000	25,00	50,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.196.200	6.901.200	13,75	13,75
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.196.200	6.901.200	13,75	13,75
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.196.200	6.901.200	13,75	14,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	126.677.400	20.432.400	16,13	16,13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	126.677.400	20.432.400	16,13	16,13
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	62.400.000	0	0,00	0,00
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	64.277.400	20.432.400	31,79	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.098.250	0	0,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.098.250	0	0,00	
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	35.098.250	0	0,00	0,00
JUMLAH	2.170.649.162	1.046.314.707	48,20	50,15

47. Kecamatan Selangit

Tabel 2.47
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Selangit

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.794.173.173	1.098.339.418	61,22	61,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.485.757.105	977.741.906	65,81	65,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.410.757.105	935.893.606	66,34	66,34
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000	41.848.300	55,80	55,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.389.000	50.139.000	56,09	56,09
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.639.000	6.639.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	5.000.000	27,03	27,03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.500.000	10.500.000	72,41	72,41
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	8.500.000	60,71	60,71
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.750.000	19.500.000	54,55	54,55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.093.000	-	-	-
Pengadaan Mebel	16.093.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.487.700	56.838.512	47,97	47,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.067.700	1.338.512	32,91	32,91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.420.000	55.500.000	48,51	48,51
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.946.368	13.620.000	17,25	17,25

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.644.000	9.120.000	23,60	23,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.802.368	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	55.710.300	30.000.000	53,85	54
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.710.300	30.000.000	53,85	53,85
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.710.300	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	250.000.000	123.942.000	49,58	49,58
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	250.000.000	123.942.000	49,58	49,58
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.000.000	123.942.000	49,58	49,58
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	113.596.700	27.759.000	24,44	24,44
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.596.700	27.759.000	24,44	24,44
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.437.700	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	58.159.000	27.759.000	47,73	47,73
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	-	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	-	-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.127.000	-	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	-	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	30.000.000	-	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	-	-	-
JUMLAH	2.255.607.173	1.280.040.418	56,75	51,21

48. Kecamatan Sumber Harta

Tabel 2.48
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Sumber Harta

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Sumber Harta				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.100.807.937	719.709.051	65,38	35,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.040.849.637	704.001.051	67,64	35,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.958.300	15.708.000	26,20	69,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.794.400		0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	12.794.400		0,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.135.900	14.633.300	33,92	33,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.385.900	8.913.300	48,48	75,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	5.720.000	31,78	75,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.750.000		0,00	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.885.000	88.323.068	47,77	47,77
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.685.000	1.323.068	13,66	45,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.200.000	87.000.000	49,66	45,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.384.250	1.999.395	14,94	80,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.384.250	1.999.395	14,94	80,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.212.800	0	0	0,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.212.800	0	0	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.312.950	3.490.700	19,06	86,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.312.950	3.490.700	19,06	86,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	241.647.000	89.755.100	37,14	38,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.647.000	89.755.100	37,14	38,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.685.000	0	0	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.560.600	0	0	61,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.560.600	0	0	61,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.202.400	13.944.600	12,32	12,32
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	61.157.800	0	0	0,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	52.044.600	13.944.600	26,79	85,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa				
Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.998.800	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.998.800	0	0	0,00
JUMLAH	1.806.942.037	931.855.214	51,571%	76,00

49. Kecamatan Tugumulyo

Tabel 2.49
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tugumulyo

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Tugumulyo				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.383.171.483	1.355.791.749	56,89	56,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.048.162.625	1.260.357.374	61,54	61,54

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.964.442.625	1.236.703.874	62,95	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	83.720.000	23.653.500	28,25	75,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.248.600	19.689.500	24,23	24,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.248.600	7.980.000	29,29	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	7.209.500	28,84	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.500.000	4.500.000	27,27	13,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.885.008	70.972.375	32,57	32,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.125.008	7.092.375	27,15	16,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.760.000	63.880.000	33,31	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.875.250	4.772.500	19,19	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.875.250	4.772.500	19,19	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.605.800	17.505.800	99,43	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.605.800	17.505.800	99,43	100,00
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.605.800	17.505.800	99,43	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	370.000.000	91.406.525	24,70	38,89
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000	4.500.000	22,50	38,89
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	4.500.000	22,50	38,89
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	86.906.525	24,83	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	350.000.000	86.906.525	24,83	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	0	0,00	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	0	0,00	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.080.000	18.080.000	41,97	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.080.000	18.080.000	41,97	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.080.000	18.080.000	41,97	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
JUMLAH	2.855.984.283	1.482.784.074	51,92	56,34

50. Kecamatan Purwodadi

Tabel 2.50
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Purwodadi

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Purwodadi				
Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.465.600	0	0,00%	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.465.600	0	0,00%	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.261.405.265	1.356.169.685	59,97%	62,99%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.169.349.865	1.336.519.685	61,61%	71,43%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.055.400	19.650.000	21,35%	54,55%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.064.900	34.493.000	37,06%	34,46%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.325.000	2.493.000	46,82%	50,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	0	0,00%	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.739.900	20.000.000	55,96%	75,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	1.000.000	7,14%	7,14%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.500.000	11.000.000	36,07%	40,17%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.637.410	50.403.350	26,58%	54,17%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.716.500	7.405.192	35,75%	58,33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.920.910	42.998.158	25,45%	50,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.890.000	10.430.950	34,90%	66,67%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.390.000	7.430.950	34,74%	66,67%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	3.000.000	35,29%	44,44%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.036.200	16.036.200	100,00%	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.036.200	16.036.200	100,00%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	93.715.000	19.900.000	21,23%	42,68%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.715.000	19.900.000	21,23%	42,68%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	408.074.934	162.890.406	39,92%	50,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	408.074.934	162.890.406	39,92%	50,00%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.144.000	29.048.000	48,30%	50,00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.144.000	29.048.000	48,30%	50,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.021.700	12.366.500	7,73%	100,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91.339.200	0	0,00%	0%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	68.682.500	12.366.500	18,01%	100%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.704.200	0	0,00%	0%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.764.200	0	0,00%	0%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.940.000	0	0,00%	0%
JUMLAH	3.345.159.209	1.691.738.091	50,57%	51,00%

51. Kecamatan Muara Beliti

Tabel 2.51
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Beliti

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.828.519.580	918.850.536	50,25	50,25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.533.062.090	802.538.708	52,35	52,35
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.469.132.240	773.837.208	52,67	50,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.929.850	28.701.500	44,90	50%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.596.300	33.100.000	35,36	35,36

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.414.300	-	0,00	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	16.000.000	66,67	66,67%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	9.000.000	50,00	50,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.182.000	8.100.000	17,93	50,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.500.000	5.000.000	21,28	21,28
Pengadaan Mebel	23.500.000	5.000.000	21,28	21,28%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.125.822	61.791.828	46,42	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50,00	50,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.598.467	5.091.828	27,38	33,33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.527.355	56.200.000	49,50	50,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.235.368	16.420.000	36,30	36,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.998.400	14.420.000	57,68	60,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.236.968	-	0,00	0,00%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	57.193.400	46.020.800	80,47	80,47
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.193.400	46.020.800	80,47	80,47
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.875.800	34.875.800	100,00	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.317.600	11.145.000	49,94	50,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	266.954.520	128.352.600	48,08	48,08
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	266.954.520	128.352.600	48,08	48,08
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.954.520	128.352.600	48,08	50,00%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.286.800	30.000.000	92,92	92,92
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.286.800	30.000.000	92,92	92,92

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.286.800	30.000.000	92,92	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.613.700	21.632.700	25,87	25,87
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.613.700	21.632.700	25,87	25,87
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika pemerintahan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.501.000	-	0,00	0,00%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51.112.700	21.632.700	42,32	100,00%
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.384.000	5.730.000	22,57	22,57
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.384.000	5.730.000	22,57	22,57
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25.384.000	5.730.000	22,57	22,57%
JUMLAH	2.293.952.000	1.150.586.636	50,16	50,19%

52. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Tabel 2.52
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.246.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.246.000	-	-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.130.858.336	546.670.531	48,34	48,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.083.938.336	527.120.531	48,63	48,63
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.920.000	19.550.000	41,67	41,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.675.000	14.499.550	22,08	22,08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.750.000	10.750.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.925.000	3.749.550	9,39	9,39
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.258.639	21.000.000	22,05	22,05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.178.639	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.080.000	21.000.000	24,68	24,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.817.250	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.817.250	-	-	-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.605.000	60.605.000	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.605.000	60.605.000	100,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.050.000	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.050.000	-	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	68.330.500	32.300.000	47,27	47,27
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	30.030.500	-	-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara				
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	38.300.000	32.300.000	84,33	84,33
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.766.450	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40.766.450	-	-	-
JUMLAH	1.517.607.175	675.075.081	44,48	44,48

53. Kecamatan Jayaloka

Tabel 2.53
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Jayaloka

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Jayaloka				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.015.636.142	1.006.381.183	49,93	49,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.708.205.446	919.658.883	53,84	53,84
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.632.605.446	907.868.883	55,61	32,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	75.600.000	11.790.000	15,60	16,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.246.000	-	-	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.246.000	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.379.392	38.749.800	41,50	41,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.950.000	27.750.000	81,74	66,67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.806.392	10.999.800	30,72	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	8.623.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.152.304	33.000.000	21,83	21,83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	18.192.304	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.960.000	33.000.000	24,82	33,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.653.000	14.972.500	34,30	34,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.653.000	14.972.500	34,30	34,30
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	54.511.000	54.511.000	100,00	100,00
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.511.000	54.511.000	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait (Musrenbang)	54.511.000	54.511.000	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	273.200.000	66.583.000	24,37	24,37
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.200.000	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.200.000	-	-	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	250.000.000	66.583.000	26,63	26,63
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	250.000.000	66.583.000	26,63	26,63
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	172.977.000	-	-	-
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	172.977.000	-	-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta pemerintahan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hari Besar Nasional)	111.285.500	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional	61.691.500	44.691.500	72,44	80,00
JUMLAH	2.516.324.142	1.172.166.683	46,58	40,00

54. Kecamatan Suka Karya

Tabel 2.54
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Suka Karya

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.225.308.832	649.216.151	53,0	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	962.046.160	554.006.051	57,6	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	905.009.160	538.866.051	59,5	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	57.037.000	15.140.000	26,54	50,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	-		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	5.500.000			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.059.350	17.395.000	25,56	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	7.020.000	7.020.000	100	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5.000.000	-	0	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.039.350	10.375.000	19	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.480.222	68.542.000	43,5	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.578.052	-	0,00	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.902.170	68.542.000	45,42	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.223.100	9.273.100	28,78	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.223.100	9.273.100	28,78	41,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.103.300	18.103.300	100,00	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.103.300	18.103.300	100,00	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.103.300	18.103.300	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.260.900	-	0,00	
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	21.260.900	-	0,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.260.900	-	0,00	50,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.078.000	-	0,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.078.000	-	0,00	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinnika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.252.000		0,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	28.826.000	-	0,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.033.500	-	0,0	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pmbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.033.500	-	0,0	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.033.500	-	0,00	0,00
JUMLAH	1.332.784.532	667.319.451	50,1	45,79

55. Kecamatan Muara Kelingi

Tabel 2.55
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Kelingi

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.243.692.819			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.880.111.678			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.822.431.528	1.181.162.607	64,81	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan	57.680.150	13.906.600	24,11	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Undangan	11.000.000			-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.980.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.780.000	11.160.000	15,99	18,18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.798.141			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000		-	25,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.369.841	952.715	14,96	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.628.300	58.470.000	23,42	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.803.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	7.583.000	-	-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.720.000	-	-	-
Program Penyelenggara Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	34.252.000			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.749.500			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah Vertikal terkait	25.749.500	24.749.500	96,12	100,00
Penyediaan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	8.502.500			
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilaya Kecamatan	8.502.500	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	280.184.000			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	280.184.000			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280.184.000	64.999.050	23,20	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.432.000			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.432.000			
Sinerginitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan instansi vertikal terkait	13.432.000	-	-	-
Program Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum	83.884.000			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.884.000			
Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksana Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	41.284.000	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional	42.600.000	19.000.000	44,60	29,41

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
dan Nasional				
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	17.020.000			
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	17.020.000			
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.020.000	-	-	-
JUMLAH	2.672.464.819	1.374.400.472	51,43	24,91

56. Kecamatan Tuah Negeri

Tabel 2.56
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tuah Negeri

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.026.938.353	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.026.938.353	643.964.807	62,71	62,71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	980.018.353	620.504.807	63,32	63,32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.920.000	23.460.000	50,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.683.670	13.736.563	35,51	35,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.750.000	6.000.000	51,06	51,06
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	14.433.670	4.611.563	31,95	31,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	3.125.000	25,00	25,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.773.895	67.257.400	39,15	39,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.773.895	1.007.400	7,89	7,89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.000.000	66.250.000	41,67	41,67

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.463.000	10.988.000	30,13	30,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.463.000	10.988.000	30,13	30,13
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.909.500		-	-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.909.500		-	-
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.909.500	28.909.500	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.652.000		-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.652.000		-	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.387.500		-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.264.500	44.264.500	84,69	84,69
JUMLAH	1.387.420.418	724.958.770	52,25	52,25

57. Kecamatan Muara Lakitan

Tabel 2.57
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Lakitan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Kabupaten/Kota	2.010.581.766	956.541.730	47,58	47,58
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.723.766	884.314.887	54,97	54,97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.543.723.766	864.918.337	56,03	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	65.000.000	19.396.550	29,84	75,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.350.000	12.500.000	13,11	13,11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	4.050.000	20,25	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.000.000	3.000.000	13,64	66,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.350.000	5.450.000	23,34	11,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.963.000	59.726.843	24,28	24,28
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.123.000	2.966.843	17,33	25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.840.000	56.760.000	24,80	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.545.000	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.545.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	0	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	375.000.000	66.036.000	17,61	17,61
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000	12.600.000	50,40	50,40
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	12.600.000	50,40	44,44
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	53.436.000	15,27	100,00
Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	350.000.000	53.436.000	15,27	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	0	0	0
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	0	0	0
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.352.000	15.776.200	36,39	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.352.000	15.776.200	36,39	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.352.000	15.776.200	36,39	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	0	0	0
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
JUMLAH	2.491.060.766	1.058.353.930	42,49	40,56

58. Kecamatan Mengang Sakti

Tabel 2.58
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Mengang Sakti

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.729.980.734	1.461.315.821	53,53	53,53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.224.986.691	1.245.257.771	114,27	114,27
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.159.388.191	1.206.965.271	55,89	55,89
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.598.500	38.292.500	58,37	58,37
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.566.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.566.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.367.100	52.641.000	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.000	5.355.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.736.000	1.736.000	9,27	9,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.036.100	19.250.000	76,89	76,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	6.500.000	36,11	36,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.240.000	19.800.000	42,82	42,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.555.743	144.219.550	49,47	49,47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.691.500	3.460.050	23,55	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.264.243	134.159.500	49,64	49,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.505.200	19.197.500	25,77	25,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.005.200	14.697.500	21,30	21,30
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	4.500.000	81,82	81,82
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	35.780.000	35.780.000	100,00	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.780.000	35.780.000	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.780.000	35.780.000	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	575.900.000	234.838.000	40,78	40,78
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.900.000	22.200.000	65,49	65,49
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.900.000	22.200.000	65,49	65,49
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	542.000.000	212.638.000	39,23	39,23
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	542.000.000	212.638.000	39,23	39,23
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	60.000.000	-		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	-		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000	-	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	107.900.000	19.700.000	18,26	18,26
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	107.900.000	19.700.000	18,26	18,26
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.300.000	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	57.600.000	19.700.000	34,20	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.100.300	-	-	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.100.300	-	-	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	28.100.300	-	-	-
JUMLAH	3.537.661.034	1.751.633.821	49,51	51,84

59. Kecamatan BTS Ulu

Tabel 2.59
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan BTS Ulu

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Kecamatan Bts. Ulu				
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2.860.949.099	1.275.526.077		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.381.640.956	1.090.329.827	45,78	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.303.540.756	1.052.704.527	45,70	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	78.100.200	37.625.300	48,18	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	3.600.000	50,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	3.600.000	50,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.213.000	49.300.250	24,50	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan/ Kantor	30.063.000	2.098.000	6,98	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.500.000	40.000.000	37,91	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.250.000	7.202.250	44,32	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	0	0,00	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.900.000	0	0,00	32,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.000.000	32.000.000	100,00	
Pengadaan Mebel	32.000.000	32.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.727.743	90.000.000	48,72	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	0	12,55	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.377.743	0	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	90.000.000	50,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.167.400	10.296.000	19,01	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.997.400	10.296.000	32,18	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	0	0,00	14,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.670.000	0	0,00	14,29
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	37.989.300	27.639.300	72,76	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.989.300	27.639.300	72,76	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37.989.300	27.639.300	72,76	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	450.266.850	209.782.400	46,59	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.000.000	0	0,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.000.000	0	0,00	15,79
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	432.266.850	209.782.400	48,53	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	432.266.850	209.782.400	48,53	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	184.340.200	0	0,00	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	184.340.200	0	0,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	184.340.200	0	0,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.860.000	29.300.000	53,41	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.860.000	29.300.000	53,41	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54.860.000	29.300.000	53,41	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.349.000	47.349.000	100,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.349.000	47.349.000	100,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	47.349.000	47.349.000	100,00	100,00
JUMLAH	3.635.754.449	1.589.596.777	54,55	71,71

Penilaian RKPD dilakukan dengan menghitung realisasi sampai dengan bulan Juni 2022. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.929.692.815,- atau sebesar 29,04% termasuk dalam kategori **rendah**. Target indikator sasaran sampai dengan bulan Juni sebesar 50,00%, sedangkan realisasi fisik capaian sebesar 28,77% termasuk dalam kategori **rendah**.

Penyebab rendahnya realisasi dan keuangan :

1. Adanya penyesuaian terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/ SJ Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022 yang menyebabkan terhambatnya penyerapan realisasi fisik dan keuangan.

2. Adanya Surat dari Kementerian Kesehatan Nomor: PR.01.01/ 1/ 2837/ 2022 dan Surat Kementerian Kesehatan Nomor KN.02.07/ I/ 1090/ 2022 yang menghimbau penundaan sementara pengadaan DAK Fisik bidang Kesehatan.
3. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan proses pelaksanaan Program/ Kegiatan menjadi terhambat dan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Terlambatnya penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang menyebabkan terlambatnya proses pelaksanaan program/kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah.
5. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang terlambat menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan lebih awal sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
6. Kurangnya koordinasi dan komitmen dari Kepala OPD sebagai pelaksana program/kegiatan terhadap pelaporan yang tepat waktu menyebabkan proses penyerapan menjadi lambat dan upaya percepatan yang direkomendasikan oleh Tim Percepatan tidak dapat terlaksana dengan baik.
7. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum tepat pada Perangkat Daerah menyebabkan ketelitian dan penempatan program/ Kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan target Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III

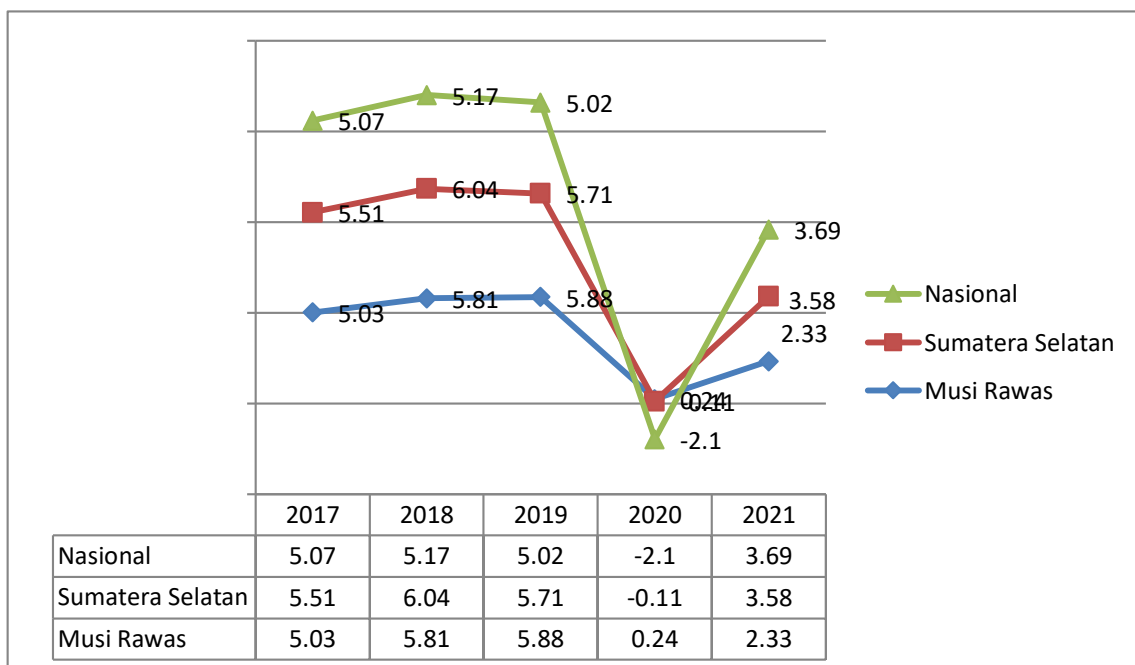
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah karena faktor perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2017-2021 dan target tahun 2022 tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017- 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2021, (data diolah)

Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2%-5,8% dan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan tumbuh sebesar 5,76%-6,54%. Dalam RKPD

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5%. pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi tetap diperkirakan akan menjadi 5 %.

Grafik 3.2
Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2022



Sumber : Bappeda (Data diolah), 2022

Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam lagi, tapi lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, air, dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah adalah sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain, dan sektor jasa-jasa.

Selama Tahun 2021 kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas telah mampu menciptakan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 20.418,19 (milyar) dan diasumsikan akan mencapai Rp 21.232,69 (milyar) pada tahun 2022.

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.1

PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB = 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (milyar rupiah) dan Target 2022

Lapangan Usaha	Realisasi					Target 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.985,20	5.289,73	5.586,00	5.821,98	6.094,95	5.920
Pertambangan dan Penggalian	4.826,24	5.520,96	6.206,80	5.944,77	6.377,85	6.030
Industri Pengolahan	2.120,01	2.365,01	2.571,30	2.705,27	2.885,81	2.840
Pengadaan Listrik dan Gas	4,55	4,81	5,00	5,74	6,2	6,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	1,37	1,50	1,58	1,61	3
Konstruksi	965,59	1.061,48	1.138,90	1.109,63	1.153,04	1.160
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.365,06	1.528,12	1.700,90	1.793,01	1.901,67	1.960
Transportasi dan Pergudangan	74,55	82,10	91,10	88,13	89,99	88,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,56	57,84	65,90	66,71	68,43	67,15
Informasi dan Komunikasi	50,06	56,26	62,10	72,69	79,58	73,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	108,35	119,30	126,10	123,80	127,61	124,04
Real Estate	217,08	240,44	268,40	279,17	285,83	279,36
Jasa Perusahaan	2,77	3,14	3,60	3,95	4,285	4,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	381,05	382,06	391,00	407,30	414,43	407,06
Jasa Pendidikan	449,18	487,35	531,06	527,47	555,73	527,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,13	122,73	131,60	146,79	555,73	147,19
Jasa lainnya	162,69	177,23	195,20	205,45	210,78	205,15
PDRB Dengan Migas	15.880,31	17.499,94	19.076,90	19.303,45	20.418,19	21.232,69

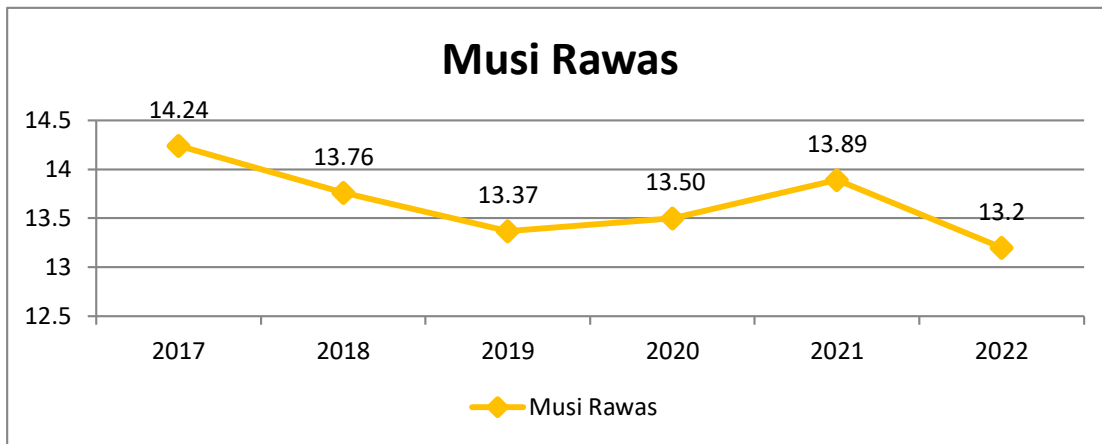
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas (2018-2021)
Target 2022 (data diolah)

c. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, pencapaian pada tahun 2021 sebesar 13,89 %

hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas bertambah 0,39 % dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 13,50 % dan diproyeksikan akan turun menjadi 13,2 % pada tahun 2022

Grafik 3.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017-2021 dan Target Tahun 2022



Sumber: BPS

Mencermati kondisi capaian angka kemiskinan terakhir yang mengalami peningkatan serta melihat kondisi perekonomian yang masih dipengaruhi pandemi Covid-19, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yang semula ditargetkan 12,86% diperkirakan menjadi 13,2%.

Grafik 3.2
Perubahan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2022



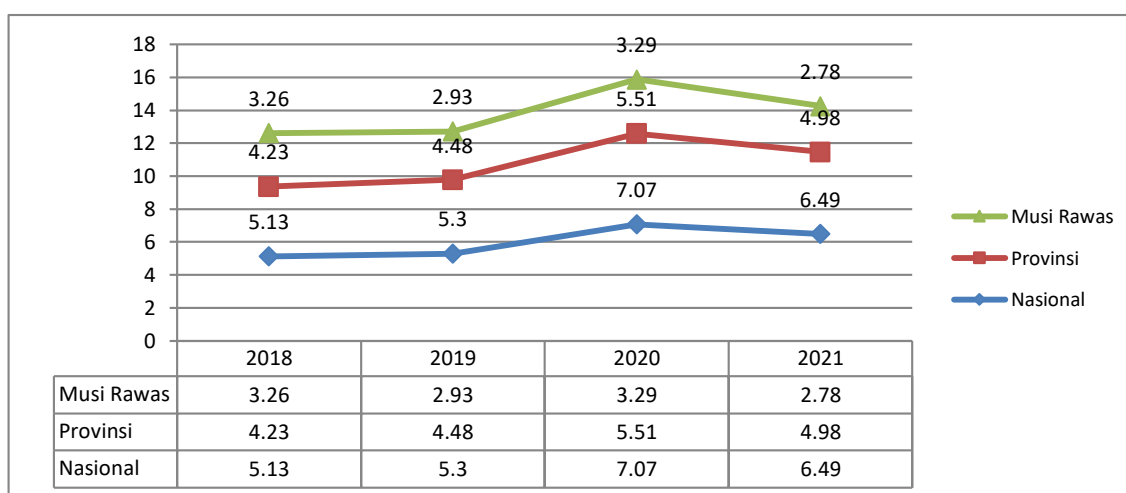
Sumber : Bappeda (Data diolah), 2021

d. Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Sementara itu, untuk tingkat pengangguran di Musi Rawas pada tahun 2021 mencapai 2,78 % yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 3.29% yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,51%. Pada RKPD Perubahan tahun 2022 tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Rawas yang pada awalnya diproyeksikan sebesar 3,22% mengalami perubahan yaitu sebesar 2,78%, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2018-2021



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Rancangan kerangka keuangan menggambarkan kondisi dan analisis keuangan daerah serta prospek pendanaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Kerangka keuangan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memberikan gambaran pendanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

a. Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pencermatan terhadap kondisi perekonomian terakhir di Kabupaten Musi Rawas yang diakibatkan oleh pandemi Corona Virus Disease 19 menunjukkan adanya penurunan kondisi ekonomi yang berdampak kepada besaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bisa dipungut oleh daerah. Untuk itu perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Tabel 3.2
Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022	REALISASI APBD TA.2022 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Bertambah/ (Berkurang)
1	Pendapatan Asli Daerah	227.038.035.454	55.134.065.444,19	290,740,077,034.18	63,702,041,580.18
1.1	Pajak Daerah	114.638.732.187	20.717.702.341	177,674,325,478	63,035,593,291.14
1.2	Retribusi Daerah	4.328.326.875	741.523.000	4,328,326,875	0
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.000.000.000	6.893.377.717,70	6,000,000,000	0
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	102.070.976.392	26.781.462.385,49	102,737,424,681.04	666,448,289.04
2	Pendapatan Transfer	1.463.348.281.309	551.186.797.865,39	1,597,578,645,205	134,230,363,896.00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000	527.804.060.273	1,430,593,436,000	36,550,216,000.00

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022	REALISASI APBD TA.2022 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Bertambah/ (Berkurang)
	a. Dan Perimbangan	1.216.701.907.000	431.658.047.353	1,216,710,440,000	47,359,560,000
	b. Dana Insentif Daerah	0	18.270.841.000	36.541.683.000	36.541.683.000
	c. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	d. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	e. Dana Desa	177.341.313.000	77.875.171.920	177.341.313.000	0
2.2	Transfer Antar Daerah	69.305.061.309	23.382.737.592,39	166,985,209,205	97,680,147,896
	a. Pendapatan bagi hasil	69.305.061.309	15.073.737.592,39	87.299.209.205	17.994.147.896
	b. Bantuan Keuangan	-	8.309.000.000	79.686.000.000	79.686.000.000
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0	10.112.483.144	12.472.483.144	12.472.483.144
3.1	Hibah	-	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	-	12.472.483.144	12.472.483.144
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.690.386.316.763	616.433.346.453,58	1,900,791,205,383.18	210,404,888,620.18

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2022

b. Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berikut ini pelaksanaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas belanja daerah :

- Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi.
- Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistic, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja
- Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
- Pengurangan persentase belanja operasional dan peningkatan persentase belanja langsung

2. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2022 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)”** Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terarah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 .

3. Pengoptimalan belanja modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

Tabel 3.3
Struktur Perubahan Belanja Daerah

No	Uraian	Belanja			
		APBD TA. 2022	REALISASI APBD TA.2022 TW II	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2022	Bertambah/ Berkurang
	BELANJA DAERAH	1,700,386,316,763.00	502.754.892.283,20	2,018,094,028,236.82	317,707,711,473.82
1.	Belanja Operasi	1,127,627,154,629.00	371.365.057.654,20	1,223,491,876,961.56	95,864,722,332.56
a.	Belanja Pegawai	646,367,056,730.00	276.569.761.208,00	706,515,514,911.36	60,148,458,181.36
b.	Belanja Barang dan Jasa	466,144,316,855.00	91.328.466.446,20	501,860,581,006	35,716,264,151.20
c.	Belanja Bunga	-	-	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
e.	Belanja Hibah	15.115.781.044	3.466.830.000	15.115.781.044	0
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2.	Belanja Modal	239,413,278,728.00	8.508.838.907	473,346,640,977.26	233,933,362,249.26
3.	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	0	14.828.192.192	(39.030.373.108)
4.	Belanja Transfer	279,487,318,106.00	122.880.995.722	306,427,318,106	26,940,000,000.00
a.	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906	0	11.896.705.906	0
b.	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200	122.880.995.722	294,530,612,200	26,940,000,0000

c. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Struktur Pembiayaan Daerah

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022	REALISASI APBD TA.2022 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Bertambah/ Berkurang
	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	117.302.822.853,64	117.302.822.853,64
1.	Penerimaan pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	117.302.822.853,64	107.302.822.853,64
a.	SiLPA	10.000.000.000,00	0,00	117.302.822.853,64	107.302.822.853,64
b.	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	
2.	Pengeluaran pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b.	pembayaran pokok utang	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2022, RKPD Kabupaten Musi Rawas mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan public
2.	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan local
3.	Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya Status Desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 terdapat 21 (duapuluh satu) Sasaran Pembangunan yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2022. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target 2022
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	55,62
	Nilai SAKIP	BB (71,01)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,51
Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2,95
	Indeks Profesionalitas ASN	62,92
Meningkatnya pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,04
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,2
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45
	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama
	Status Kabupaten Layak Anak	700 Madya
Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	96%
Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70

Sasaran	Indikator	Target 2022
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan local dan kebudayaan	Indeks Budaya Literasi Daerah	30
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	92,19
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	96,5
	Indeks Sumber Daya Air	52
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,90
Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96
Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	50
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp.6.057,19 milyar
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1682,29 milyar
	PDRB sektor perdagangan	Rp 982,5 milyar
Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	8 %
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.2
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	2,78
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94
Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	34,94

4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2022

RKPD Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Tema pembangunan

nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah "Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020, Rancangan Awal RKP 2022, Rancangan RKPD Sumatera Selatan Tahun 2022, maka permasalahan di Kabupaten Musi Rawas, serta kerangka RKPD Kab. Musi Rawas Tahun 2022 dirumuskan didalam tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yaitu :

"Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis

Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)"

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia membawa implikasi terhadap terganggunya pertumbuhan ekonomi global. Data yang dilansir International Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi secara global diproyeksikan menjadi di angka 4,0 persen pada tahun 2022. Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman baru bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang berkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 akan terfokus pada 3 keyword/kata kunci tema yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Keyword tema pembangunan tahun 2022 adalah:

a. Penanganan Dampak Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk keluar dari keterpurukan akibat Pandemi Covid 2019. Seiring dengan usaha pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam upaya menghentikan penyebaran Pandemi Covid 19 termasuk proses vaksinasi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meluncurkan bantuan dunia usaha dan rumah tangga untuk mengendalikan laju

pertumbuhan ekonomi agar bangkit dari keterpurukan. Kabupaten Musi Rawas yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dikembangkan akan tetapi belum dikelola secara maksimal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk mengolah potensi yang tersedia menjadi ekonomi riil yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen untuk menghilangkan kendala serta hambatan teknis yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan dampak ekonomi yaitu :

- Penurunan angka pengangguran;
- Peningkatan daya beli masyarakat.
- Peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

Seperti kita ketahui bersama bahwa terjadinya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan hampir terhadap seluruh sektor kehidupan, antara lain ;

- Pertumbuhan ekonomi melambat;
- Peningkatan pengangguran;
- Peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas;
- Angka kemiskinan naik;
- Rawan pangan;
- Kesenjangan sosial ekonomi meningkat;
- Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi;
- Inflasi meningkat;
- Pembangunan infrastruktur terhambat.

Dengan demikian penanganan dampak ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan merupakan persoalan di Kabupaten Musi Rawas sehingga perlu upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, beberapa kebijakan

langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan subsidi silang, skema bantuan langsung masyarakat (BLM), pemberian modal usaha untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan kesehatan dan pendidikan, serta program jaring pengaman lainnya. Namun, upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin memang bukan perkara mudah, butuh waktu dan konsistensi serta upaya yang luar biasa dengan menciptakan berbagai terobosan dan kebijakan yang tepat dan efektif.

Terlebih lagi, dengan adanya wabah Covid 19 maka bisa dipastikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas akan meningkat. Sehingga sangat diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mampu memberikan solusi dan efek percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas.

b. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas yaitu tersedianya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan beberapa hal :

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)

c. Pembangunan Sumber Daya Manusia (Penanganan Kesehatan dan Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial)

Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kapasitas dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dimaksud bertujuan untuk :

- Melakukan penanganan kesehatan, pendidikan dan penyediaan jaringan pengaman sosial untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Musi Rawas;
- Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, energi dan air bersih

Tabel 4.3

Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

TEMA	
“Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)”	
TEMATIK	
PENGUATAN SEKTOR STRATEGIS	PEMULIHAN EKONOMI
Prioritas: - optimalisasi pengelolaan sektor unggulan dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas	Prioritas: 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan
KONDISI PERLU	
Prioritas : - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa berbasis teknologi informasi untuk pelayanan prima	

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan tematik yang sesuai dengan mempertimbangkan 2 (dua) dimensi pembangunan. Dimensi penguatan sektor strategis mengangkat tematik optimalisasi pengelolaan sektor unggulan dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas, sedangkan dimensi pemulihan ekonomi mengangkat tematik pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Kedua tematik tersebut didukung dengan kondisi perlu yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa berbasis teknologi informasi untuk pelayanan prima.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4

Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2022 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2022

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Strategis Menuju Musi Rawas Yang Maju, Mandiri Dan Bermartabat (MANTAB)	Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Keselarasan tema pembangunan antara RKPD Musi Rawas dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah memiliki kata kunci **“Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi”**. *Pemulihan Ekonomi* adalah keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, penambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit. Adanya rencana “Pemulihan Ekonomi” dilatarbelakangi oleh dampak terjadinya penyebaran wabah Covid 19 yang menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian, menurunnya pendapatan perkapita, menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia termasuk juga di provinsi Sumatera Selatan bahkan di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, *Pembangunan ekonomi* inklusif mempunyai makna sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

4.3 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun sebelumnya, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Musi Rawas pada Tahun 2022, maka terdapat beberapa telaah yang harus dilakukan, yaitu:

4.3.1. Telaah Terhadap RKP 2022

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah skala nasional mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perencanaan nasional Tahun 2022 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Dalam RPJMN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”, maka tujuan RPJMN Tahap ke-4 Tahun 2020-2024 diarahkan kepada **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut: Kelembagaan politik dan hukum.

1. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
2. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif.

3. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan pada RPJPN maka tema pada RPJMN 2020-2024 adalah **”Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”** yang didukung dengan :

1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Karakter Bangsa
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Selanjutnya berdasarkan RPJPN dan RPJMN 2020-2024 maka telah ditetapkan tema RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :\

“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL”

Tema RKP Tahun 2022 tersebut didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.3.2. Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai Berikut:

“Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 terdiri dari:

1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Stunting
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana;
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan.

4.3.3. Telaah Terhadap pemenuhan janji Kepala Daerah pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021– 2026

Sesuai dengan janji kampanye Ratna Machmud dan Suwarti pada kampanye Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang telah lalu, telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 melalui visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 -2026 adalah:

“MURA MANTAB 2026”

“Maju, Mandiri dan Bermartabat”

Makna visi “Mura Mantab 2026” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maju dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat bermartabat”. Adapun pengertian dari akronim “Musi Rawas Mantab” adalah sebagai berikut:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religius).

- Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

4.3.4. Telaah Terhadap Isu Strategis

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di Bab 2 didepan, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya jumlah penduduk miskin dan banyaknya sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi covid19 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya investasi dan daya saing daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi dan daya saing daerah serta pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian, perikanan hulu sampai hilir, destinasi wisata dan UMKM
<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya hasil produksi dan rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penciptaan dan pengembangan destinasi pariwisata 	
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas koperasi dan 	

Permasalahan	Isu Strategis
UMKM masih terbatas	
<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur yang belum merata dan konektivitas antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public dengan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan aparatur pemerintah yang bersih dan pelayanan prima

4.4 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2022

4.4.1 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2022

Dengan memperhatikan telaah tersebut diatas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 adalah:

Tabel 4.6

Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2022
1	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	55,62
2	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	PDRB sektor pertanian	Rp.6.057,19 milyar

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2022
		Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94
		Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	PDRB sektor Industri	Rp 1682,29 milyar
			PDRB sektor perdagangan	Rp 982,5 milyar
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	Persentase Koperasi Aktif (%)	70
			Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,27
		Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	Angka Kemiskinan	13,2
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	76,05
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,21
3	Pemerataan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase Konektivitas antar wilayah	92,19%
		Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan dan pengairan	Indeks Infrastruktur Dasar	96,5
			Indeks Sumber Daya Air	52
		Meningkatnya pembangunan Infrastruktur TIK	Persentase layanan penyebaran informasi pembangunan daerah (%)	80
4	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,90
		Meningkatnya pelayanan	Indeks Penurunan	50 %

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2022
		kebencanaan	Dampak Resiko Bencana	
5	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	79,2
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74

Selain memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.7 diatas serta RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dalam penentuan prioritas daerah tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022, serta RKPDPProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Berdasarkan arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi, selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yaitu untuk mendukung pencapaian fokus dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas maka penjabaran tema dan prioritas pembangunan dituangkan ke dalam arah kebijakan, program prioritas dan program nomenklatur pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan SDM aparat melalui pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dan memiliki literasi teknologi informasi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip <i>the</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional dalam rangka penyederhanaan eselonisasi dan peralihan ke jabatan fungsional) Peningkatan profesionalisme 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kinerja aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan sumber daya manusia Program kepegawaian daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			<i>right man on the right place</i>	dan kesejahteraan pegawai			
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> Program aplikasi informatika 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pengawasan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Program penyelenggaraan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akuntabilitas kinerja ASN Pemasyarakatan kamtibmas 	<ul style="list-style-type: none"> n yang baik dan bersih Pemeliharaan kamtibmas 	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 	<ul style="list-style-type: none"> pemerintah yang baik Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk	1. meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
	pengentasan kemiskinan	pertumbuhan perekonomian	melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi		dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat		

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>lahan pertanian ke non pertanian dan mempertahankan catchment area serta meningkatkan tutupan lahan di daerah hulu</p>				
			<ul style="list-style-type: none"> • Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumberdaya 			<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas sektor pertanian

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Musi Rawas				
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan budidaya 			<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi peternakan 			<ul style="list-style-type: none"> Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan ketersediaan distribusi pangan dan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hilirisasi produk - produk unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan derajat kemandirian pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pogram pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan daerah rawan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal menuju kedaulatan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan diversifikasi pangan 				
3. Meningkatnya kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/peningkata 			<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	memfasilitasi sarana prasarana perdagangan		n sarana dan prasarana perdagangan	sarana distribusi perdagangan	prasarana pasar
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi produk-produk unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan industri kecil dan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas IKM
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi industri bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan dan magang untuk pelaku industri kecil dan menengah 			
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi tumbuh dan berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kewirausahaan dan keunggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan UKM dan koperasi

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	<p>ya usaha ekonomi produktif dan kreatif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing UKM non pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan strategis antara 	<p>kompetitif UKM non pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan Tripartit (masyarakat, 	koperasi, UMKM	<p>menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama koperasi, UMK dan UMKM

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			koperasi, UMK dan UMKM	pemerintah, dunia usaha)		kelembagaan koperasi	
			<ul style="list-style-type: none"> Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Koperasi dan Bumdes 		<ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan lembaga ekonomi desa 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas data sasaran program untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran • Meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran program perlindungan sosial • Meningkatkan Kualitas SDM (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan PMKS secara terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program rehabilitasi sosial • Program pemberdayaan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin • Penyaluran bantuan untuk PMKS • Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
							dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
		6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan dan pengembangan destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan destinasi wisata baru Pengembangan destinasi wisata Pemasaran destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan pemasaran pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan destinasi wisata Pengembangan pemasaran pariwisata
3.	Peningkatan pembangunan	1. Meningkatnya panjang jalan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun/ meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
	Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	dan jembatan dalam kondisi mantap	meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata	konektivitas jaringan jalan dan jembatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan • Memprioritaskan pembangunan didesa tertinggal	konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas	• Program penyelenggaraan jalan	peningkatan jalan dan jembatan
		2. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan dan pengairan	• meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	• mendayagunakan sumber daya air untuk mendukung ketahanan	• peningkatan pembangunan dan pemeliharaan	• Program pengelolaan sumber daya air	• Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			jaringan irigasi, rawa dan sumber pengairan lainnya.	pangan dan kesejahteraan masyarakat	infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya		
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan instalasi penyediaan air minum dan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk
							<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan /pembuatan sumber air bersama di kawasan pemukiman

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dan perbatasan meliputi bantuan stimulasi penanganan kumuh guna menuju permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penanganan pemukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Rehabilitasi rumah tidak layak huni

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>yang sehat dan layak</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penataan tata kelola penanganan pemukiman kumuh di pedesaan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan 				
		3. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur TIK	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Informasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan dan pengadaan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			<p>prasarana penunjang Tekonlogi Informasi Komunikasi (TIK)</p>	<p>pendukung informasi dan komunikasi publik</p>	<p>prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)</p>	<p>komunikasi publik</p>	<p>sarana dan prasarana TIK yang berkualitas dan merata</p>
4.	<p>Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan kualitas SDM

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			sarana prasarana kesehatan dan SDM bidang kesehatan serta masyarakat berpola hidup sehat	Bidang Kesehatan • Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat		sumber daya manusia kesehatan • Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	bidang kesehatan • Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
			• Meningkatnya kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi serta pelaksanaan	• meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak	• Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi	• Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	• Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			KB guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		<ul style="list-style-type: none"> Percepatan penurunan stunting 	kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan gizi masyarakat
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengendalian penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan melalui deteksi dini penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit 		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Program Wajib Belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pendidikan formal 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas SDM/Tenaga Pendidik, serta beasiswa kepada penduduk kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan masyarakat 		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen pelayanan pendidikan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
					pendidikan nonformal		
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan agama untuk menciptakan kehidupan yang agamis 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama baik formal maupun nonformal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan
				<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agama serta aktivitas keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wawasan keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
5.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemafaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh, terpadu adil dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya pelayanan kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penanganan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program penanganan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan dan pemulihan pasca bencana
			<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana 			<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 didukung dengan Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah. Program Prioritas dan Kegiatan Daerah harus memiliki indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Masing-masing Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima

Program Prioritas : Peningkatan kapasitas kinerja aparatur

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	Meningkatnya Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ASN yang memiliki sertifikat peningkatan kompetensi sesuai dengan jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> 56 % 	BKPSDM
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan kebutuhan formasi jabatan ASN 	<ul style="list-style-type: none"> 59 % 	BKPSDM

Tabel 4.9

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima

Program Prioritas : Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik	Meningkatnya Pelayanan publik berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Indeks SPBE Persentase pemanfaatan dan pengembangan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2,95 50 % 	Diskominfo Diskominfo

Tabel 4.10

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima

Program Prioritas : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • IKM • Nilai SAKIP • Level Maturitas SPIP • Indeks RB • IPKD 	<ul style="list-style-type: none"> • 89,57 • B • Level 3 • 55,62 • 81,51 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes, RS. Sobirin, Disdukcapil, Diknas, Dishub • Bag Organisasi Setda • Inspektorat • Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bag. Organisasi Setda, BKPSDM • BPKAD

Tabel 4.11

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima

Program Prioritas : Pemeliharaan kamtibmas

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks ketertiban dan ketentraman masyarakat • Angka penanganan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 86 	<ul style="list-style-type: none"> • Satpol PP Damkar • Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Bag. Tata Pemerintahan Setda

Tabel 4.12

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk produk pertanian	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> PDRB Sektor Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> 5, 035 T 	<ul style="list-style-type: none"> Distanak, Diskan, Disbun, DKP
Peningkatan produktivitas sektor pertanian	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Persentase capaian peningkatan produksi tanaman pangan Persentase capaian peningkatan produksi tanaman hortikultura Persentase capaian peningkatan produksi tanaman perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 % 3 % 1 % 	<ul style="list-style-type: none"> Distanak Distanak Dinas Perkebunan
Peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Produksi perikanan tangkapi (Ton) 	<ul style="list-style-type: none"> 42.103,86 426,05 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perikanan Dinas Perikanan
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> Persentase capaian peningkatan produksi peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 % 	<ul style="list-style-type: none"> Distanak

Tabel 4.13

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Peningkatan derajat kemandirian pangan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya Penanganan daerah rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> 77,94 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan diversifikasi pangan	Meningkatnya Pengembangan diversifikasi pangan			

Tabel 4.14

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana pasar	Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana pasar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Yang Ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 pasar 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4.15

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan kualitas dan kuantitas IKM	Meningkatnya kualitas dan kuantitas IKM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Usaha mikro dan Kecil 	<ul style="list-style-type: none"> 0,27 % 	Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 4.16

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pemberdayaan UKM dan koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan UKM dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase koperasi aktif 	<ul style="list-style-type: none"> 70 % 	Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 4.17

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Penurunan angka kemiskinan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin	Meningkatnya Pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> Angka Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> 12,86 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial DPMD

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penyaluran bantuan untuk PMKS	Meningkatnya Penyaluran bantuan untuk PMKS			
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			

Tabel 4.18

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan

Program Prioritas : Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengembangan destinasi wisata	Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	• 76,05 %	Disbudpar
Pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya Pengembangan pemasaran pariwisata			

Tabel 4.19

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Meningkatnya Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pembangunan Jalan • Persentase peningkatan jalan • Persentase rehab/pemeliharaan jalan • Persentase pembangunan jembatan • Persentase peningkatan jembatan • Persentase rehab/pemeliharaan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • 19,7 % • 16,57 % • 17,89 % • 10,00 % • 16,67 % • 15,79 % 	Dinas PU Bina Marga

Tabel 4.20

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan Irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Meningkatnya Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kinerja sistem irigasi 	65	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan

Tabel 4.21

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	Meningkatnya Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak 	98,66	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan
Pembangunan /pembuatan sumber air bersama di kawasan pemukiman	Meningkatnya Pembangunan /pembuatan sumber air bersama di kawasan pemukiman			
Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga bersanitasi 	98,75	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan

Tabel 4.22

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Peningkatan penanganan pemukiman kumuh

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Meningkatnya Rehabilitasi rumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> Rasio rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> 32 	Dinas Perkim

Tabel 4.23

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi

Program Prioritas : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TIK yang berkualitas dan merata	Meningkatnya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TIK yang berkualitas dan merata	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penuntasan blank spot area 	<ul style="list-style-type: none"> 85 	Diskominfo

Tabel 4.24

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu Pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai Standar 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	Dinkes
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar dan obat covid-19 	100%	Dinkes
Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas SDM bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang kesehatan 	100%	Dinkes

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase meningkatnya kemitraan dibidang pelayanan kesehatan 	100%	Dinkes

Tabel 4.25

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatnya Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Angka kelahiran kasar Angka prevalensi kontrasepsi modern 	<ul style="list-style-type: none"> 19 77,57 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 4.26

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Percepatan penurunan stunting

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan gizi masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> 73,4 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan, RS. Sobirin, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 4.27

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular 	73,4	Dinas Kesehatan, RS Sobirin

Tabel 4.28

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas pendidikan formal

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel	<ul style="list-style-type: none"> APK PAUD/TK APM PAUD/TK APK SD/MI APM SD/MI APK SMP/MTS APM SMP/MTS 	<ul style="list-style-type: none"> 68,5 % 58 % 113 % 98,3 % 123 % 97,5 % 	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun	<ul style="list-style-type: none"> Rata rata lama sekolah Angka melek huruf Angka melanjutkan jenjang SD/Mi Angka 	<ul style="list-style-type: none"> 8,5 Th 99,72 % 98,75 % 97,75 % 	Dinas Pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
		melanjutkan jenjang SMP/MTs		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian standar • Persentase SD/SMP yang terakreditasi A 	<ul style="list-style-type: none"> • 85 % • 30 % 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.29

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan I	Meningkatnya Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian standar SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • 85 % 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.30

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
penyelenggaraan pendidikan nonformal	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase lembaga kursus terakreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 % 	Dinas Pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan manajemen dan evaluasi terhadap kinerja bidang pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan manajemen dan evaluasi terhadap kinerja bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian standar SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • 85 % 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.31

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah bantuan rumah tahfidz • Jumlah bantuan pondok pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 • 28 	Bagian Kesra Setda

Tabel 4.32

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing

Program Prioritas : Pengembangan wawasan keagamaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kerukunan umat beragama 	<ul style="list-style-type: none"> • 74 	<ul style="list-style-type: none"> • Bag. Kesra Setda • Badan Kesbangpol

Tabel 4.33

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatnya Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> IKLH 	<ul style="list-style-type: none"> 62,816 	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.34

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Prioritas Daerah : Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas : Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2022	OPD Penanggungjawab
Penanganan dan pemulihan pasca bencana	Meningkatnya Penanganan dan pemulihan pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> Indeks penurunan dampak resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> 53,57 % 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD
Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD

Tabel 4.35
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
PN 1						
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan						
1	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan hutan berkelanjutan	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Penyediaan air untuk pertanian	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengelolaan sumber daya air

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program pengelolaan sumber daya air
		Pemeliharaan, Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk revitalisasi Danau dan Infrastruktur	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
						Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Pengembangan Waduk Multiguna	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
2	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perikanan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan derajat kemandirian pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Pogram pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Pengembangan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
				terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat		
		Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan derajat kemandirian pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Program pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Pengembangan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan Peningkatan fasilitas usaha pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
		Peningkatan		Peningkatan	Peningkatan	Program

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		SDM dan Rise t Kemaritiman dan Kelautan serta database kelautan dan perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	n Produksi dan Produktivitas Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
4.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah dan besar	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pengembangan kerjasama koperasi, UMK dan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes	Program pengembangan lembaga ekonomi desa

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
5.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan Investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Objek Wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
		Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Pengembangan industri halal	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
6.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
Peningkatan		Tata kelola birokrasi	Penyelenggara	Peningkatan	Program	

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		kandungan dan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah yang efektif	yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	an pemerintahan yang baik dan bersih	akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Pelayanan Pengadaan
		Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan branding dan produk kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan Pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
7.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan Industri 4.0	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan system logistic dan stabilitas	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk	Peningkatan Produksi, dan Nilai	Peningkatan Produksi dan produktivitas	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		harga	pengentasan kemiskinan	Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian masyarakat	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		perkembangan ekonomi terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan data informasi statistik daerah
PN 2						
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
-	-	-	-	-	-	-
PN 3						
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan Administrasi Kependudukan.
		Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Pendampingan dan layanan terpadu	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependidikan
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependidikan
2.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Sistem jaminan sosial nasional	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah	Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
						Pelayanan dan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
					kesejahteraan sosial lainnya	Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
		Kesejahteraan sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatterpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Perbaikan Gizi Masyarakat
		Peningkatan pengendalian penyakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Penguatan gerakan masyarakat	Pembangunan Sumber Daya	Peningkatan layanan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		hidup sehat (Germas)	Manusia (SDM) yang berdaya saing	yang berkualitas	pelayanan kesehatan	
		Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pengawasan Obat dan Makanan
4.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan	Program Pendidikan Usia Dini
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga pendidik	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penjaminan mutu pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan tata kelola kependidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib pendidikan dasar sembilan tahun
5.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
	npemuda			anak		
		Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		Kualitas Pemuda	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Pemberdayaan Pemuda	Peningkatan kualitas pemuda	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Peningkatan peran sertakepemudaan
6.	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
		Keperantaraan usaha dan dampak sosial	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Reforma Agraria	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
		Perhutanan Sosial	Memperkuat ketahanan	Pemberdayaan ekonomi	Penguatan perekonomian	Program Perencanaan dan Pengembangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	masyarakat	n pedesaan	Hutan
8.	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Program Pendidikan NonFormal
				Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pengembangan Inovasi Daerah
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga						
						Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga
PN 4						
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Revolusional dan pembinaan ideology pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkualitas	Revolusi mental dalam system pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pengembangan dan pengelolaan keragaman dan nilai budaya	Program pengembangan nawasan kebangsaan
		Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk buday abirokrasi yang bersih, melayani dan responsive	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Revolusi mental dalam system Sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program peningkatan perlindungan anak

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusional	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
		Pembangunan dan kebudayaan system ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
		Pembinaan ideology Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela Negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kualitas koperasi
2.	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
	jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan bangsa					
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya bangsa untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya
		Pengembangan diplomasi kebudayaan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat,	Penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan	Program pengembangan ketahanan ekonomi,

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		untuk memperkuat Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	berbasis teknologi untuk pelayanan prima	yang baik dan bersih	keuangan instansi pemerintah	sosial dan budaya
		Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan kebudayaan
3.	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Penyelarasan Relasi agama dan budaya	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pengembangan wawasan keagamaan	Penyelenggaraan musik rawa bertilawah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4.	Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan budayaliterasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan , pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksaradaerah serta sastra		Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun	
Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta		Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun	
Penguatan institusi sosial penggerak		Pembangunan Sumber Daya	Peningkatan budayaliterasi	Peningkatan budaya gemar	Program pembinaan perpustakaan	

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		literasi dan inovasi	Manusia (SDM) yang berdaya saing		membaca	
PN 5						
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Layanan Dasar						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana pemukiman	Program pengembangan perumahan
					Pembangunan sarana keciptakarya	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan
		Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan Program peningkatan jalan dan jembatan			
		Sanitasi layak dan aman	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangunan sarana sanitasi	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			pengembangan ekonomi			
			Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Program pengembangan lingkungan sehat
		Pengelolaan air tanah dan air baku merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangunan sarana penyediaan air minum dan air bersih	Program Pengembangankinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan					
		Keselamatan dan keamanan transportasi	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pemeliharaan/ rehabilitasi bangunan pengendalian banjir/ pengamanan sungai	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			pengembangan ekonomi			
						Program pengendalian banjir dan pengamanan sungai
						Program pembangunan turap/talud/bronjong
		Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
						Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya
3.	Infrastruktur Perkotaan	Transportasi Perkotaan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			pengembangan ekonomi			
4.	Energi dan Ketenagalistrikan	Keberlanjutan penyediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif
		Akses dan keterjangkauan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif
		Kecukupan penyediaan energy dan tenaga listrik	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
5.	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Pemanfaatan infrastruktur TIK	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
		Fasilitas Pendukung transformasi digital	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika

PN 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Penguatan kelembagaan dan pecegahan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Penanggulang an bencana	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran						
Program Pembinaan						

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
						Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan ketahanan iklim	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
						Program Perencanaan Pengembangan Hutan
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3.	Pembangunan rendah karbon	Pembangunan energy berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Berkelanjutan
		Pemulihan Lahan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan
			Memperkuat ketahanan ekonomi	Peningkatan produksi dan nilai	Peningkatan produksi dan	Program Peningkatan produksi

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			rakyat untuk pengentasan kemiskinan	tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	produktivitas perkebunan dan peternakan	(pertanian/Perkebunan)
		Pengembangan industri hijau	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi	Peningkatan penanaman modal	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pengembangan Inovasi Daerah Program Pendayagunaan Iptek	Program Pengembangan Sentra-sentra industry potensial
PN 7						
Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis	Penyelenggaraan pemerintahan Yang baik dan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program pendidikan politik masyarakat

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			teknologi untuk pelayanan prima	bersih	instansi pemerintah	
		Peningkatan kualitas komunikasi publik	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program Pengelolaan aplikasi informatika
2.	Optimalisasi kebijakan luar negeri	Penguatan integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	-	-	-	-
		Penguatan kerjasama pembangunan internasional	-	-	-	-
		Peningkatan citra positif di Dunia Internasional	-	-	-	-
		Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global	-	-	-	-
3.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan implementasi manajemen ASN	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Transformasi pelayanan public	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan peraturan perundang-undangan
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan keamanan dalam negeri	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Pemasyarakatan Kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtibmas	Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak criminal
		Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM	-	-	-	-
		Penguatan keamanan laut	-	-	-	-
		Penguatan keamanan dan ketertiban	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat,	Pemasyarakatan kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtibmas	Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak


No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		masyarakat	berbasis teknologi untuk pelayanan prima			criminal
		Penguatan Ketahanan dan Keamanan siber	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah

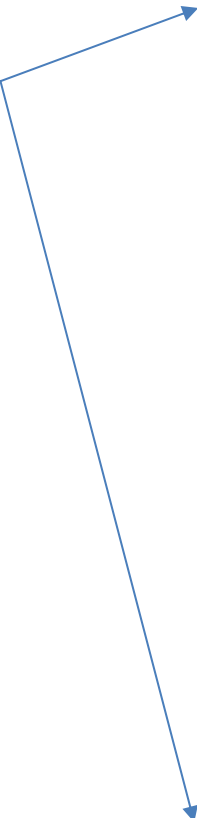

4.5. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Kabupaten Musi Rawas secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yang direncanakan pada sub bab didepan juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Sumatera Selatan Tahun 2022. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas provinsi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.36
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan
Prioritas Provinsi Tahun 2022

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
1.	Percepatan penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Stunting		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
			Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Percepatan penurunan stunting
2.	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata;		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat Peningkatan derajat kemandirian pangan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan Pemberdayaan ekonomi masyarakat Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
				Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
3.	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;		Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit Peningkatan kualitas pendidikan formal Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan Pengembangan wawasan keagamaan

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022
4.	Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana;		Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi Peningkatan penanganan pemukiman kumuh Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
			Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
5.	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan		Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Peningkatan kapasitas kinerja aparatur Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih Pemeliharaan kamtibmas

Tabel 4.37

Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan
RPJMD 2021-2026

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
1.	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan SDM aparat melalui pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dan memiliki literasi teknologi informasi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip <i>the right man on the right place</i> Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu Meningkatkan pengawasan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional dalam rangka penyederhanaan eselonisasi dan peralihan ke jabatan fungsional) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai Pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat Sistem pengawasan internal 	M1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			menjamin akuntabilitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akuntabilitas kinerja ASN 	
		2. Meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasyarakatan kamtibmas 	
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	1. meningkatkan kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mempertahankan catchment area serta meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan hasil produksi 	M5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			<p>tutupan lahan di daerah hulu</p> <ul style="list-style-type: none"> Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumberdaya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Musi Rawas Meningkatkan produksi perikanan budidaya Meningkatkan produksi peternakan 		
		2. Meningkatkan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> Memantapkan ketersediaan distribusi pangan dan keamanan pangan Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal menuju kedaulatan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Hilirisasi produk-produk unggulan 	
		3. Meningkatkan kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan dan memfasilitasi sarana 	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi pasar 	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
		perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	prasarana perdagangan <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan IKM Meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi industri bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan promosi produk-produk unggulan daerah Melakukan pelatihan dan magang untuk pelaku industri kecil dan menengah 	
		4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif dan kreatif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing UKM non pertanian Membangun kemitraan strategis antara koperasi, UMK dan UMKM Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM non pertanian Membangun kemitraan Tripartit (masyarakat, pemerintah, dunia usaha) Pemberdayaan Koperasi dan Bumdes 	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi		
		5. Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas data sasaran program untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran Meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran program perlindungan sosial Meningkatkan Kualitas SDM (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan PMKS secara terpadu 	
		6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan dan pengembangan destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan destinasi wisata baru Pengembangan destinasi wisata Pemasaran destinasi wisata 	
3.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	1. Meningkatkan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun/meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan jembatan sampai ke wilayah-wilayah terpencil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 	M3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPd TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
		2. Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan dan pengairan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan sumber pengairan lainnya. • Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan dan perbatasan meliputi bantuan stimulasi penanganan kumuh guna menuju permukiman yang sehat dan layak • Melaksanakan penataan tata kelola penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan pembangunan didesa tertinggal • mendayagunakan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan pembangunan instalasi penyediaan air minum dan air bersih • Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Meningkatkan pembangunan rumah layak huni 	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			<p>pemukiman kumuh di pedesaan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan</p>		
		3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur TIK	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik 	
4.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan SDM bidang kesehatan serta masyarakat berpola hidup sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kesehatan Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat 	M2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi serta pelaksanaan KB guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak 	
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengendalian penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan melalui deteksi dini penyakit 	
		2. Meningkatkan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Program Wajib Belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 	
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas SDM/Tenaga Pendidik, serta beasiswa kepada penduduk kurang mampu 	
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, 		

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
			<p>ketrampilan masyarakat</p>		
		<p>3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan agama untuk menciptakan kehidupan yang agamis 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama baik formal maupun nonformal Mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agama serta aktivitas keagamaan 	
5.	<p>Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>	<p>1. meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemafaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh, terpadu adil dan berkelanjutan. 	<p>M3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan</p>

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2022	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
		2. Meningkatkan pelayanan kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penanganan bencana Mengurangi risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana 	

4.6 Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan

4.3.1. Strategi Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Penyebaran kasus Corona virus Disease 2019 (covid-19) sudah mulai terdapat di Kabupaten Musi Rawas sejak bulan April 2020. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 yaitu:

1. Strategi Tata Kelola

Tata kelola pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas dipayungi dengan diterbitkannya SK Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Kabupaten Musi Rawas. Satuan tugas ini bertugas untuk pengendalian dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) di Kabupaten Musi Rawas. Secara kelembagaan, untuk setiap desa dan kecamatan telah dibentuk Posko Siaga Penanggulangan Covid-19 di 199 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan.

2. Strategi Penanganan Kesehatan

Penanganan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor hilir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan kebijakan-kebijakan pendukung untuk diterapkan di Musi Rawas seperti

mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat termasuk perilaku rajin cuci tangan, serta sosialisasi physical distancing dan mengurangi kerumunan dan keramaian. Selain itu, sesuai dengan program pemerintah pusat telah diadakan program pemberian vaksin kepada masyarakat yang dilakukan secara bertahap.

Di sektor hulu dilakukan penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracking yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri, dan isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit.

3. Strategi Penyediaan Jaminan Sosial

Penyediaan jaminan sosial dilaksanakan berupa pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi covid 19. Bentuk bantuan sosial yang diberikan berupa paket sembako. Barang yang diberikan kepada masyarakat dibeli dari masyarakat petani di Kabupaten Musi Rawas, sehingga selain penyediaan jaminan sosial juga secara tidak langsung berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi masyarakat. Adapun kriteria masyarakat penerima bantuan terdiri dari :

- Masyarakat yang sudah terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Masyarakat miskin baru akibat pandemi covid-
- Masyarakat terdampak karena profesi (pekerja seni dan pelaku wisata)
- Masyarakat lain yg dipandang perlu untuk dibantu sesuai usulan pemerintah desa/kelurahan

4. Strategi Pemulihan Ekonomi

Melalui stimulus yang diberikan kepada masyarakat, berupa bantuan modal usaha dan prasarana sebagai upaya penguatan dan optimalisasi produktivitas sektor-sektor strategis di Kabupaten Rawas yaitu sektor

pertanian dalam arti luas, meliputi tanaman padi sawah irigasi, perkebunan karet, kopi, sawit dan lain-lain, budidaya ikan tawar dan peternakan. Selain itu, stimulus yang dimaksud, diberikan juga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Kriteria penerima bantuan ini berdasarkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan.

4.3.2. Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisirkan, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.

2. Tanpa adanya kelaparan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.

4. Pendidikan berkualitas.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.

5 Kesetaraan gender.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.

6 Air bersih dan sanitasi layak.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7 Energi bersih dan terjangkau.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.

8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.

9 Industri, inovasi dan infrastruktur.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Berkurangnya kesenjangan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara.

11. Kota dan komunitas berkelanjutan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan perubahan iklim.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,

14. Ekosistem laut.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem daratan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 4.21 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs

Tabel 4.38
Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
2	Tanpa adanya kelaparan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Percepatan penurunan stunting
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan formal • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal
5	Kesetaraan gender.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
6	Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
7	Energi bersih dan terjangkau	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan penanganan pemukiman kumuh
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) • Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
		Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi masyarakat • Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM
10	Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas
11	Kota dan komunitas	Peningkatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
	berkelanjutan	Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
13	Penanganan perubahan iklim	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.6.3. Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh OPD dengan didukung Tim Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain :

- Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG)
- Pencanaan Musi Rawas sebagai Kabupaten layak anak,
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/meminimalisir kematian Ibu dan bayi.
- Kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, serta

- Koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Musi Rawas meliputi PKK, DWP, dan GOW.

Tabel 4.39

Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarustamaan Gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.6.4. Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
- 3) Pemanfaatan teknologi bagi aparatur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- 4) Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan

- 1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah,

posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

4.6.5 Arah Pengembangan Kecamatan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah seperti kandungan sumber daya alam, perbedaan demografis, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dari hasil Musrenbang Tahun 2021, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2022 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2022. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada Tahun 2022 adalah pencapaian target prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut tertuang dalam daftar program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, karena bersifat indikatif maka implementasinya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, berikut rencana pembiayaan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	FOKUS	Program Prioritas	PAGU INDIKATIF (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur 2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	• Peningkatan kapasitas kinerja aparatur	102.452.160.978,50	Seluruh Perangkat Daerah
			• Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	85.325.311.267,00	
			• Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	61.015.367.056,88	
			• Pemeliharaan kamtibmas	39.698.664.000,00	
Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 1				288.491.503.302,38	
2.	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	1. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian 2. Meningkatnya kemandirian pangan 3. Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian 5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS 6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	• Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	105.217.513.385,25	1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi UKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. DPMPSTP 8. BPPRD 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 10. Dinas Sosial 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			• Peningkatan derajat kemandirian pangan	27.815.288.985,50	
			• Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	4.982.396.723,00	
			• Pemberdayaan ekonomi masyarakat	13.234.450.701,00	
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	3.230.602.246,00	
			• Penurunan angka kemiskinan	366.562.433.815,50	
			• Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	4.965.056.851,00	
			Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 2		

NO	PRIORITAS	FOKUS	Program Prioritas	PAGU INDIKATIF (Rp)	Perangkat Daerah
3.	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 2. Meningkatnya infrasturkur keciptakaryaan dan pengairan 3. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur TIK	• Pembangunan konektivitas jaringan jalan dan jembatan yang merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Musi Rawas	232.525.077.589,00	1. Dinas PU BM 2. Dinas PUCKTRP dan Pengairan 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 6. Dinas Lingkungan Hidup
			• peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	58.792.331.653,78	
			• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	41.797.657.445,50	
			• Peningkatan penanganan pemukiman kumuh	63.773.434.551,00	
			• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	4.497.760.173,00	
Junlah Pagu Indikatif Prioritas 3				401.386.261.412,28	
4.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan	254.297.222.631,04	1. Dinas Kesehatan 2. RS. Dr. Sobirin 3. Dinas Pendidikan 4. Setda (Bagian Kesra) 5. Badan Kesatuan Bangsa Politik 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
			• Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan Reproduksi	7.354.340.915,00	
			• Percepatan penurunan stunting	28.376.748.877,87	
			• Peningkatan upaya kesehatan promotif-preventif untuk pencegahan penyakit	6.252.507.000,00	
			• Peningkatan kualitas pendidikan formal	444.293.379.090,00	
			• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik	470.874.000,00	

NO	PRIORITAS	FOKUS	Program Prioritas	PAGU INDIKATIF (Rp)	Perangkat Daerah
					Perlindungan Anak
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal 	1.051.811.000,00	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan 	15.263.456.578,00	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wawasan keagamaan 	4.443.293.572,00	
Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 4				761.803.633.663,91	
5.	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya pelayanan kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Program Penanggulangan Bencana 	<p>24.322.569.890,00</p> <p>16.082.317.261,00</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas PUCKTRP 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4. Dinas Pertanian dan Peternakan 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Pagu Indikatif Prioritas 5				40.404.887.151,00	
Jumlah				2.018.094.028.236,82	

Selanjutnya pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tetap mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 yaitu: 1) Urusan Kesehatan, 2) Urusan Pemulihan Ekonomi, dan 3) Urusan Perlindungan Sosial . Strategi – strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam RKPD 2022 dialokasikan sebesar 6,64% dari Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas atau Rp. 112.288.099.389 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Rencana Alokasi Pendanaan untuk penanganan *Covid-19*
Tahun 2022

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
Pemulihan Ekonomi				20.981.859.600	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29.045.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.999.950	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ KoTa	144.997.000	
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)	Pameran Dagang Nasional	225.000.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
		Daerah Kabupaten/Ko ta			
	Program Standardisasi Dan Erlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera. Tera Ulang	129.391.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengawasan/P e yuluhan Metrologi Legal	41.168.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunn Industri Kabupaten/Ka ta	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	35.000.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	214.999.500	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	42.087.750	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	77.325.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	99.930.000	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
		Kabupaten/Kota			
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	129.349.850	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	190.263.400	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	300.358.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	111.162.950	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.447.685.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.350.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	943.833.600	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	828.987.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Pengendalian dan Penanggulan an Penyakit Hewan dan Zoonosis	82.800.700	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	629,505,500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.544.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/Ko ta	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	71.689.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	99.400.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	2.454.565.500	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Penyuluhan Pertanian		
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	647.374.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	290.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	115.332.000	Dinas Perkebunan
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.850.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan. Penanganan Kebakaran Lahan. dan Gangguan Usaha Tanaman pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	82.667.500	Dinas Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	85.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	527.155.000	Dinas Perikanan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	915,000,000	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampinga. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24.999.900	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.435.486.900	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12.501.900	Dinas Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	25.000.000	Dinas Perikanan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
		Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	134.747.600	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	227.177.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	60.345.400	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Adat	1.018.007.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	60.327.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.044.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	187.678.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.090.100	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	45.629.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	63.267.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	55.936.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Bidang Kesehatan				89.269.885.382	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.577.800.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	139.260.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.060.740.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.655.200.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.673.753.430	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	267.886.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.671.853.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat. Vaksin	2.711.790.315	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.568.122.465	Dinas Kesehatan
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85.000.000	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	164.062.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199.032.500	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	630.713.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	129.242.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	108.811.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.725.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	122,975,000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.158.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	266.781.600	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	691.291.270	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
			Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	919.817.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	115.989.200	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	171.413.600	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	247.400.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	35.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	128.927.200	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	214.556.920	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	634.905.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.188.866.162	Dinas Kesehatan
			Penyelenggara an Kabupaten/Kot a Sehat	40.000.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	387.000.000	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.980.000.000	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	70.000.000	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	314.483.900	
		Penyelenggar aan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	185.000.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	624.261.100	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaguna an Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Ko ta	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.000.000	Dinas Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	110.210.000	Dinas Kesehatan
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	79.700.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
		Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	151.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	110.000.000	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	126.368.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh ustri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk akanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh	145.856.620	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungja wab
			Industri Rumah Tangga		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi. Pemberdayaa n. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	226.673.000	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	97.300.000	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	Rs. dr. Sobirin
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	550.000.000	Rs. dr. Sobirin
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.023.773.740	Rs. dr. Sobirin
Bidang Perlindungan Sosial				10.057.518.350	
	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaa n Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	65.789.500	Dinas Sosial
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	33.600.000	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	64.033.600	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	85.260.600	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	524.971.200	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.999.900	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	79.153.400	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Penyediaan Sandang	38.449.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	133.678.700	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	53.757.200	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan . Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	59.400.000	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	453.851.600	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	60.124.800	Dinas Sosial
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	285.801.000	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.400.161.900	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	107,107,000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	102.900.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	63.262.600	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	205.499.000	Dinas Sosial
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	26.716.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	52.000.150	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	18,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah				120.309.263.332	

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam hal pembiayaan pembangunan daerah juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Program dan Kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan
Dengan Pembiayaan Bersumber Dari *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan	Volume	Lokasi	Perusahaan
1	Rehab Masjid Al-Barokah	1 Unit	Desa Megang Sakti	Bank Sumsel Babel, PT SM
2	Rehab Masjid Baitul Mukmin	1 Unit	Desa Megang Sakti	Bank BRI
3	Rehab Masjid Ar-Rahman	1 Unit	Desa Petunang	PT. WAS dan PT Tropik
4	Pembuatan WC	4 Pintu	Desa Petunang	PT. SAS
5	Rahab Masjid	1 Unit	Desa Ciptodadi	Bank Mandiri
6	Rahab Masjid Nurul Falaq	1 Unit	Desa Sukowarno	PT. PHML
7	Rehab Masjid Molek	1 Unit	Desa Muara Lakitan	PT. SMS

NO	Program/Kegiatan	Volume	Lokasi	Perusahaan
8	Pengerasan Jalan Usaha Tani	1.500 M	Desa Babat	PT. Evan Lestari
9	Pembangunan Ruang Guru dan Toilet	2 Unit	Desa Sri Pengantin	PT. Charoen Pokphand Indonesia
10	Rehab Masjid Kebur Jaya	1 Unit	Desa Kebur Jaya	PT AKL
11	Pembangunan Jalan Cor Semen	400 M	Desa Anyar Kec. Muara Lakitan	PT. Bina Sain

Dari usulan rencana kerja dan pendanaan daerah melalui perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang didalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4

Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2022

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran Perubahan 2022
1	Dinas Pendidikan	488.953.441.895
2	Dinas Kesehatan	197.243.105.834
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	93.444.932.299
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan	141.666.012.463
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	232.525.077.589
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	77.402.427.575
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.500.538.104
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.310.882.453
9	Dinas Sosial	14.584.101.598
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.390.562.107
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.772.886.955
12	Dinas Ketahanan Pangan	10.135.301.341
13	Dinas Lingkungan hidup	11.491.440.363
14	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.845.312.529
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.894.254.220
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.986.408.827
17	Dinas Perhubungan	7.289.738.081
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	9.612.279.529
19	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	4.327.772.286
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.059.334.277

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran Perubahan 2022
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.592.476.216
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.113.240.938
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.249.933.772
24	Dinas Perikanan	8.379.157.705
25	Dinas Pertanian dan Peternakan	34.155.097.946
26	Dinas Perkebunan	9.406.149.781
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.337.237.511
28	Sekretariat Daerah	62.755.386.810
29	Sekretariat DPRD	95.018.758.716
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.920.043.875
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	335.746.452.268
32	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.924.961.363
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.356.492.544
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.671.366.610
35	Inspektorat	17.226.827.583
36	Kecamatan BTS ULU	3.010.167.438
37	Kecamatan Muara Kelingi	2.771.379.819
38	Kecamatan Muara Lakitan	3.022.261.952
39	Kecamatan Jayaloka	2.830.459.321
40	Kecamatan Mengang Sakti	3.933.051.443
41	Kecamatan Sukakarya	1.595.985.803
42	Kecamatan Tuah Negeri	1.570.045.718
43	Kecamatan Tugumulyo	3.572.129.952
44	Kecamatan Purwodadi	4.030.494.038
45	Kecamatan STL ULU Terawas	2.652.112.188
46	Kecamatan Sumber Harta	2.337.613.638
47	Kecamatan Muara Beliti	2.554.105.425
48	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.671.403.775
49	Kecamatan Selangit	2.885.523.940
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.367.899.824
Jumlah		2.018.094.028.237

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 beserta pergeseran/alokasi anggaran sesuai urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah diuraikan secara rinci pada tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh OPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

Muara Beliti, *12 Agustus* 2022

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD
RATNA MACHMUD